

Dr. Drs. H. Sueb, M.Pd.

ANALISIS WACANA KRITIS UNTUK MEMBEDAH GRAMATIKAL DALAM DEBAT PUBLIK PILKADA JAWA TIMUR



Penerbit
UWKS PRESS

ANALISIS WACANA KRITIS UNTUK MEMBEDAH GRAMATIKAL DALAM DEBAT PUBLIK PILKADA JAWA TIMUR

Dr. Drs. H. Sueb, M.Pd.



**PENERBIT
UWKS PRESS**

ANALISIS WACANA KRITIS UNTUK MEMBEDAH GRAMATIKAL DALAM DEBAT PUBLIK PILKADA JAWA TIMUR

ISBN 978-623-7354-65-9
Ukuran buku 15,5 x 23 cm
64 hlm
Cetakan ke-1, Februari 2025

Penulis:

Dr. Drs. H. Sueb, M.Pd

Editor:

Friendha Yuanta

Penerbit:

UWKS PRESS

Anggota IKAPI No.206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018
Anggota APPTI No.002.071.1.12019

Jl. Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya Jawa Timur 60225
Telp. (031) 5677577
Hp. 085745182452
Email : uwkspress@gmail.com / uwkspress@uwks.ac.id

**Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini
dengan cara apapun, termasuk dengan penggunaan
mesin fotokopi, tanpa izin sah dari penerbit**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan karunia dan rahmat-Nya penyusunan buku yang berjudul Analisis Wacana Kritis Untuk Membedah Gramatikal Dalam Debat Publik Pilkada Jawa Timur terselesaikan dengan baik.

Dalam konteks politik debat publik telah menjadi salah satu sarana penting bagi para calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka kepada masyarakat. Namun, di balik argumen-argumen yang disampaikan, terdapat dinamika kekuasaan dan strategi bahasa yang kompleks. Oleh karena itu, buku ini hadir untuk membedah gramatikal dalam debat publik Pilkada Jawa Timur melalui analisis wacana kritis.

Semoga buku ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami peran bahasa dalam debat publik dan membangun kesadaran kritis dalam masyarakat.

Dr. Drs. H. Sueb, M.Pd.

SINOPSIS

Buku ini membahas tentang analisis wacana kritis dalam debat publik Pilkada Jawa Timur. Penulis menggunakan teori analisis wacana kritis untuk membedah strategi bahasa yang digunakan oleh calon gubernur dan wakil gubernur dalam debat publik.

Dalam buku ini, penulis juga membahas tentang pentingnya analisis wacana kritis dalam memahami dinamika kekuasaan dan strategi bahasa dalam debat publik. Selain itu, penulis juga memberikan contoh-contoh kasus debat publik Pilkada Jawa Timur untuk memperjelas analisisnya.

Buku ini sangat cocok untuk mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang analisis wacana kritis dan strategi bahasa dalam debat publik. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi referensi bagi mereka yang ingin melakukan penelitian tentang debat publik dan analisis wacana kritis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SINOPSIS	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Batasan Istilah	6
E. Manfaat	10
BAB II TINJAUAN BAHASA KRITIS	14
A. Debat Publik	14
B. Kampanye	15
C. Ideologi	17
D. Pilkada	20
E. Analisis Wacana Kritis (AWK)	22
F. Unsur Gramatikan/Pemaknaan Kalimat	25
BAB III MENDEKATI DEBAT PUBLIK DENGAN LANGKAH KRITIS	34
A. Objek Penelitian	35
BAB IV ANALISIS LANGKAH KRITIS DALAM DEBAT PUBLIK	36
A. Nilai Pengalaman	36
B. Nilai Relasional	43
C. Nilai Ekspresif	54
D. Result	59
BAB V TEMUAN DEBAT PUBLIK	62
DAFTAR PUSTAKA	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Debat publik calon gubernur Jawa Timur tahun 2018 menjadi salah satu momen yang penting dalam perjalanan demokrasi di propinsi ini. Sebagai ajang yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Jawa Timur, debat ini menghadirkan dua pasang calon yang bertarung memperebutkan kursi gubernur dan wakil gubernur. Kedua pasangan calon berupaya menyampaikan visi, misi, serta program kerja yang ditujukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan utama di Jawa Timur, mulai dari Pembangunan ekonomi, Pendidikan, hingga infrastruktur. Selain itu, debat public ini juga menjadi wadah bagi para kandidat untuk memaparkan strategi dan kebijakan yang mereka tawarkan guna meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur dalam lima tahun ke depan.

Melalui debat ini, Masyarakat tidak hanya melihat kemampuan komunikasi para kandidat, tetapi juga menilai sejauh mana calon pemimpin mereka memahami permasalahan yang ada dan mampu menawarkan Solusi konkret. Berbagai isu penting yang diangkat dalam debat, seperti ketimpangan Pembangunan antar wilayah, perbaikan system Pendidikan, serta pengurangan kemiskinan, menjadi sorotan utama. Perbedaan pandangan dan pendekatan yang diambil masing-masing kandidat dalam menghadapi isu-isu tersebut menciptakan dinamika debat yang cukup menarik dan memperlihatkan kualitas kepemimpinan masing-masing calon.

Selain menjadi ajang adu gagasan, debat public ini juga berperan dalam mempertegas karakter dan integritas calon pemimpin Jawa Timur. Sikap dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis, cara menghadapi lawan bicara, serta ketenangan dalam merespon berbagai permasalahan menjadi cerminan dari kepribadian dan kesiapan para kandidat. Dengan

demikian, debat ini tidak hanya memberikan informasi yang lebih jelas kepada Masyarakat, tetapi juga menjadi salah satu instrument penting dalam proses penilaian dan pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur yang terbaik bagi masa depan Jawa Timur.

Pemilihan Kepala Daerah selanjutnya disebut Pilkada merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh masyarakat baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pada saat pilkada dilaksanakan masyarakat akan menentukan calon pilihannya sesuai dengan hati nuraninya. Mereka memilih calon pemimpin terutama yang sesuai dengan program-program yang diharapkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Dalam rangka untuk dapat merebut hati para calon pemilihnya pasangan calon melakukan kampanye dengan berbagai cara.

Pomper (dalam Lailiyah, 1997 : 13) menyatakan bahwa dalam ilmu politik, kampanye adalah kegiatan persuasif yang secara formal berusaha meyakinkan masyarakat bahwa satu partai peduli dan secara serius ingin memecahkan sederet isu politik secara bersama-sama, bahkan partai politik yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Jadi seorang jurkam dalam upaya menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat pastilah dia menggunakan bahasa yang baik dengan mengangkat isu-isu politik yang berkembang saat ini.

Kampanye dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dilaksanakan melalui media cetak, radio, televisi, di media sosial, di gedung, atau di lapangan (Hadi, 1988). Setiap cara pelaksanaan memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Penelitian ini menekankan pada teknik pelaksanaan kampanye langsung di lapangan atau di gedung pertemuan. Di samping itu kampanye

dapat dilakukan dengan mengadakan debat publik. Dalam relasi antara media massa dan demokrasi, media terutama dilihat sebagai saluran politik.

Hal ini dapat terlihat dari dua bentuk saluran politik. Pertama, media sebagai saluran komunikasi antara para elit, baik yang berada di posisi tertentu dalam pemerintah ataupun elit yang tidak berada dalam pemerintahan, dengan warga atau konsituennya. Kedua, media berperan sebagai yang belum tentu beriringan dengan kepentingan para elit yang ada.

Adapun demokrasi mensyaratkan adanya suasana kebebasan dalam berbicara dan menyampaikan pendapat sehingga terciptanya ruang debat publik yang sehat. Untuk itu, syarat ini secara tidak langsung akan menciptakan sistem pers yang juga bersifat demokratis. Posisi media massa dianggap netral dan hanya sebagai perantara semata. Media massa hanya sebagai alat yang menjembatani segala macam fakta dan opini dalam komunikasi politik yang terjadi. Padahal, ada kalanya media massa justru berfungsi sebagai pihak yang menciptakan isu-isu tertentu dalam debat publik dalam suatu peristiwa politik (Arrini, 2013:30).

Pemilihan umum (Pemilu) atau pemilihan kepala daerah (Pilkada) membutuhkan hadirnya debat publik untuk menambah wawasan masyarakat terhadap program-program yang disampaikan oleh calon legislatif atau calon kepala daerah. Program-program yang dimaksud untuk memperbaiki atau meningkatkan kehidupan masyarakat lima tahun ke depan. Debat publik dapat digunakan untuk mengenal lebih dekat calon legislatif atau calon kepala daerah, sehingga melalui debat publik ini dapat mempengaruhi pilihan rakyat dalam pelaksanaan pilkada. Siapa calon yang menyampaikan program paling realistis dan mudah dicerna oleh masyarakat, maka dialah yang memperoleh suara yang signifikan, sehingga dapat memenangkan pilkada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti akan mengangkat judul, “Unsur Semantis Debat Publik Pasangan Calon pada Pilgub Jatim 2018 dalam Menyampaikan Program Pembangunan Jatim Lima Tahun ke Depan: Kajian Analisis Wacana Kritis (AWK).” Peneliti mengangkat judul tersebut, karena debat publik yang dilakukan oleh kedua pasangan calon dapat meningkatkan elektabilitas pasangan calon. Apabila program yang disampaikan dapat menyentuh hati dan kebutuhan masyarakat baik jangka pendek, menengah atau panjang.

B. Rumusan Masalah

Debat publik calon gubernur Jawa Timur tidak hanya menjadi ajang untuk adu gagasan, tetapi juga kesempatan untuk melihat bagaimana setiap calon menyampaikan program kerja mereka secara jelas dan efektif. Salah satu aspek penting yang dapat dianalisa dari debat ini adalah penggunaan unsur gramatikal dan pemaknaan dalam kalimat-kalimat yang disampaikan oleh para calon. Penggunaan bahasa, pilihan kata, struktur kalimat, dan cara mengkomunikasikan visi serta program pembangunan menjadi faktor yang mempengaruhi cara masyarakat memahami dan menilai komitmen serta kompetensi para calon.

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini fokus pada bagaimana unsur gramatikal dan pemaknaan kalimat digunakan oleh pasangan calon saat menyampaikan program pembangunan Jawa Timur untuk lima tahun kedepan. Dengan menganalisa aspek ini, penulis berupaya mengungkap sejauh mana para calon mengartikulasikan ide dan gagasan mereka dengan tepat, efektif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Pemahaman ini penting karena cara seseorang pemimpin menyampaikan kebijakan dapat mempengaruhi penerimaan publik terhadap visi tersebut, serta menggambarkan kemampuan calon dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh struktur kalimat dan pilihan kata terhadap kekuatan persuasif dari pidato atau pernyataan yang disampaikan oleh calon gubernur. Dengan menganalisa unsur gramatikal dan pemaknaan, studi ini akan memberikan gambaran lebih mendalam tentang bagaimana bahasa digunakan sebagai alat komunikasi politik dan instrumen untuk mempengaruhi opini publik dalam proses pemilihan kepala daerah. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang efektifitas komunikasi politik para calon dalam menyampaikan program-program yang relevan untuk pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini yaitu: mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengeksplanasikan pemaknaan kata/semantik yang digunakan oleh pasangan calon dalam menyampaikan program pembangunan Jawa Timur lima tahun ke depan. Dengan menganalisis pemaknaan kata, penelitian ini akan mengungkap bagaimana pasangan calon memilih dan menggunakan kata-kata yang berperan dalam menyampaikan gagasan, visi, serta strategi mereka terkait pembangunan Jawa Timur.

Tujuan utama penelitian ini adalah mendeskripsikan secara rinci bagaimana pilihan kata dan istilah yang digunakan oleh para calon dalam debat publik, serta melihat bagaimana kata-kata tersebut membentuk pesan yang mereka sampaikan pada masyarakat. Proses deskripsi ini akan mencakup identifikasi pola penggunaan kata kunci, ungkapan, dan terminologi yang berkaitan dengan berbagai aspek pembangunan, seperti ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan sosial.

Penelitian ini juga berupaya menginterpretasikan makna di balik kata-kata yang dipilih oleh pasangan calon. Dalam tahap ini, analisis lebih

mendalam dilakukan untuk memahami bagaimana setiap kata atau frasa yang digunakan memiliki konotasi tertentu yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplanasikan bagaimana penggunaan semantik dalam komunikasi politik ini berfungsi untuk menciptakan pesan yang kuat, menakutkan, dan relevan dalam konteks debat publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana bahasa politik digunakan secara strategis untuk mempengaruhi opini publik dan menyampaikan program pembangunan secara efektif.

D. Batasan Istilah

- 1) Bahasa Kampanye adalah salah satu jenis ragam bahasa yang digunakan oleh jurkam untuk meyakinkan masyarakat pemilih terhadap program-program yang telah digariskan oleh partai. Penggunaan bahasa adalah cara-cara masyarakat mengaktualisasikan ujaran dan tulisannya. Ragam bahasa ini memiliki karakteristik yang khas, karena bertujuan untuk membangun kepercayaan dan dukungan publik terhadap visi, misi, dan kebijakan yang diusung oleh partai atau calon. Bahasa kampanye dirancang sedemikian rupa agar pesan-pesan politik dapat disampaikan dengan jelas, persuasif, dan mudah dipahami oleh masyarakat dari berbagai lapisan.

Penggunaan bahasa dalam kampanye adalah bentuk aktualisasi ujaran dan tulisan yang merepresentasikan cara partai atau calon berinteraksi dengan konstituen. Melalui bahasa, juru kampanye tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berupaya mempengaruhi emosi, pandangan, dan keputusan pemilih. Ragam bahasa kampanye sering kali mengandung elemen-elemen retorika yang kuat, seperti penggunaan kata-kata yang bermakna positif, slogan-slogan yang

mudah diingat, serta narasi yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Dalam konteks ini, bahasa berperan sebagai alat komunikasi yang strategis, di mana setiap kata, kalimat, dan gaya bahasa dipilih secara cermat untuk mengekspresikan visi politik yang ingin disampaikan. Kemampuan juru kampanye untuk memanfaatkan bahasa secara efektif menjadi salah satu faktor kunci dalam membangun citra politik dan memperoleh dukungan dari masyarakat pemilih.

2) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada bertujuan untuk memilih kepala daerah, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang nantinya akan menjalankan tugas pemerintahan di tingkat daerah. Mekanisme ini mencerminkan prinsip demokrasi, di mana rakyat memiliki hak penuh untuk memilih pemimpin mereka secara langsung melalui proses pemungutan suara.

Pilkada diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Dasar hukum penyelenggaraan Pilkada tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur proses, tata cara, dan ketentuan pelaksanaan Pilkada agar berlangsung secara transparan dan demokratis, dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran.

Dalam pelaksanaannya, Pilkada harus memenuhi sejumlah persyaratan penting, termasuk keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pemilihan, pengawasan yang ketat untuk mencegah kecurangan, serta pemastian bahwa setiap suara dihitung secara adil. Dengan demikian, Pilkada tidak hanya menjadi bentuk partisipasi politik masyarakat, tetapi juga merupakan wujud nyata dari upaya untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang responsif dan bertanggung jawab kepada rakyat.

- 3) Debat publik adalah perbincangan terbuka yang melibatkan diskusi tentang suatu hal, isu, atau objek tertentu di hadapan audiens. Dalam debat ini, berbagai pandangan dan argumen dikemukakan secara langsung oleh pihak-pihak yang berkompeten atau berkepentingan terhadap topik yang dibahas. Tujuan utama dari debat publik adalah untuk mengeksplorasi berbagai sudut pandang yang ada, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai isu yang sedang diperbincangkan.

Debat publik juga berfungsi sebagai sarana untuk menguji ide-ide, argumen, dan kebijakan yang diusulkan, di mana para peserta berusaha meyakinkan audiens atau publik akan kebenaran atau keunggulan dari sudut pandang mereka. Selain sebagai ajang adu gagasan, debat publik memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam serta menjadi lebih kritis dalam menilai topik yang dibahas, khususnya dalam konteks pemilihan atau pengambilan keputusan penting.

Dalam praktiknya, debat publik sering digunakan dalam ranah politik, pendidikan, atau sosial, di mana berbagai pemangku kepentingan,

seperti kandidat politik atau ahli, berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pandangan mereka. Ini memberikan kesempatan bagi audiens untuk melihat bagaimana masing-masing pihak merespons tantangan dan pertanyaan kritis terkait isu yang dibahas.

- 4) Analisis Wacana Kritis (AWK) sangat relevan untuk menganalisis wacana yang muncul dalam debat publik, seperti yang terjadi dalam debat calon gubernur Jawa Timur 2018. Dalam konteks ini, wacana yang digunakan oleh para kandidat tidak hanya dilihat sebagai komunikasi biasa, melainkan sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh dan sekaligus memengaruhi struktur politik, institusi, dan masyarakat yang lebih luas. AWK memandang penggunaan bahasa dalam debat politik sebagai bagian dari upaya para kandidat untuk membentuk persepsi publik, mengontrol narasi, serta mempengaruhi opini pemilih.

Wacana dalam debat gubernur, seperti yang terjadi pada Pilgub Jatim 2018, mencerminkan hubungan dialektis antara peristiwa diskursif (misalnya, pernyataan-pernyataan kandidat) dan konteks sosial-politik di mana peristiwa itu terjadi. Isu-isu yang dibahas dalam debat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, sangat dipengaruhi oleh situasi sosial di Jawa Timur pada saat itu. Sebaliknya, bagaimana isu-isu tersebut dikemas dan disampaikan oleh para kandidat juga berpengaruh pada struktur sosial, khususnya pada bagaimana pemilih menilai dan merespon gagasan serta visi yang ditawarkan.

Melalui AWK, kita bisa menelusuri bagaimana para kandidat menggunakan bahasa untuk memposisikan diri mereka sebagai pemimpin yang kompeten, sekaligus bagaimana mereka membingkai

lawan politik mereka. Misalnya, dalam debat Pilgub Jatim 2018, para kandidat bisa saja menggunakan strategi bahasa tertentu untuk menonjolkan kepemimpinan mereka dalam isu-isu spesifik, seperti pemberdayaan ekonomi pesantren, guna menarik basis pemilih Muslim tradisional yang merupakan kelompok signifikan di Jawa Timur. Pada saat yang sama, mereka mungkin menggunakan wacana tertentu untuk mendiskreditkan kebijakan atau latar belakang lawan mereka, menggambarkan kandidat lain sebagai tidak kompeten atau tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

AWK juga memungkinkan kita melihat siapa yang memiliki kontrol atas wacana yang dominan dalam debat ini. Dalam konteks debat publik, media sering kali memiliki peran penting dalam membingkai isu-isu yang dibahas. AWK dapat membantu mengungkap bagaimana media, melalui pilihan framing tertentu, bisa saja memperkuat atau melemahkan wacana yang diusung oleh salah satu kandidat. Dalam Pilgub Jatim 2018, misalnya, media mungkin lebih menyoroti isu-isu tertentu seperti kesejahteraan nelayan atau pembangunan infrastruktur yang bisa menguntungkan kandidat yang memiliki kekuatan politik atau jaringan ekonomi yang lebih besar.

E. Manfaat

Manfaat penelitian ini ada dua macam, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- 1) Manfaat teoritis dari penelitian ini berfokus pada kontribusi yang diberikan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dan perspektif yang berbeda mengenai penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya dalam analisis wacana. Dengan mengeksplorasi bagaimana bahasa berfungsi

sebagai alat untuk membangun makna, kekuasaan, dan identitas, penelitian ini dapat memperkaya khasanah teori yang ada dalam kajian linguistik, sosiolinguistik, atau ilmu komunikasi. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, yang dapat menginspirasi kajian lebih mendalam tentang hubungan antara bahasa dan masyarakat.

2) Manfaat praktis, yaitu

Manfaat praktis dari penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bagi Pendidikan dan Pengajaran Bahasa Indonesia: Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan kurikulum dan metode pengajaran bahasa Indonesia. Dengan memahami bagaimana wacana berfungsi dalam konteks sosial, pendidik dapat merancang bahan ajar yang lebih relevan dan kontekstual. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu siswa memahami penggunaan bahasa dalam berbagai situasi, serta meningkatkan kemampuan kritis mereka dalam menganalisis teks dan konteks sosial di sekitarnya. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar bahasa secara mekanis, tetapi juga dapat mengaitkan pelajaran bahasa dengan realitas sosial yang lebih luas.

Manfaat ini mencakup pengembangan keterampilan komunikasi siswa, memperkuat pemahaman mereka tentang dinamika sosial yang terkait dengan bahasa, serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat yang lebih kompleks.

b. Bagi Masyarakat Pemilih

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bekal pengetahuan yang memadai bagi masyarakat pemilih dengan

berbagai tingkat pengetahuan dan kemampuan tentang politik. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai makna dan implikasi dari bahasa yang digunakan oleh juru kampanye (jurkam) calon gubernur, masyarakat pemilih dapat lebih kritis dalam menganalisis pesan-pesan politik yang disampaikan. Pengetahuan ini membantu mereka untuk memahami konteks dan tujuan dari wacana yang dihasilkan selama kampanye, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi. Dengan cara ini, masyarakat pemilih akan lebih mudah menentukan pilihan mereka, berpartisipasi dalam proses politik secara aktif, dan menjadi pemilih yang lebih cerdas.

c. Bagi Pelaku Politik

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan para pelaku politik, khususnya para jurkam. Dalam konteks politik yang semakin kompetitif, kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan simpatisan sangatlah penting. Dengan memanfaatkan kompetensi gramatikal, sosiolinguistik, kewacanaan, dan strategik yang diuraikan oleh Canale (1983), seorang jurkam dapat lebih efektif dalam menguasai audiens mereka. Pemahaman tentang cara menggunakan bahasa yang tepat dalam konteks sosial tertentu memungkinkan mereka untuk memotivasi, menarik perhatian, dan membangun hubungan yang kuat dengan simpatisan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi jurkam untuk menyusun strategi komunikasi yang lebih baik dalam kampanye politik.

d. Bagi Peneliti Berikutnya

Penelitian ini juga akan memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya sebagai referensi untuk penelitian yang akan dilaksanakan kemudian. Dengan menyajikan temuan dan analisis mengenai penggunaan bahasa dalam konteks politik, penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain yang tertarik pada isu-isu serupa. Peneliti berikutnya dapat menggunakan metodologi, teori, dan temuan yang ada untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut, baik dalam kajian politik, linguistik, maupun sosiologi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menginspirasi kajian yang lebih mendalam tentang pengaruh wacana politik terhadap masyarakat, serta evolusi strategi komunikasi dalam konteks pemilihan umum di masa depan.

UWKSPress

BAB II

TINJAUAN BAHASA KRITIS

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji dinamika debat publik dan penggunaan bahasa kampanye dalam konteks pemilihan kepala daerah (pilkada), dengan pendekatan Analisis Wacana Kritis (AWK). Teori-teori ini saling terkait dan memberikan kerangka yang komprehensif untuk memahami bagaimana wacana politik dibentuk dan berfungsi dalam masyarakat. Debat publik menjadi arena penting di mana para calon kepala daerah menyampaikan visi, misi, dan argumentasi mereka, sedangkan bahasa kampanye mencerminkan strategi komunikasi yang digunakan untuk menarik perhatian pemilih. Melalui AWK, penelitian ini berupaya mengungkap relasi kuasa dan ideologi yang terkandung dalam bahasa yang digunakan oleh para kandidat, serta dampaknya terhadap persepsi dan keputusan pemilih. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori dalam studi bahasa dan politik, tetapi juga memberikan wawasan praktis bagi masyarakat dan pelaku politik dalam konteks pilkada.

A. Debat Publik

Debat publik berasal dari bahasa Inggris “debate” yang berarti memperbincangkan/ perbincangan dan “public” yang berarti umum. Jadi yang dinamakan debat publik adalah perbincangan umum tentang sesuatu, hal, atau objek (Wasito, 1997:38 dan 163).

Khusus dalam penelitian ini debat publik mengandung maksud perbincangan terhadap program-program yang disampaikan oleh pasangan calon pemimpin daerah Jawa Timur tentang pembangunan 5 tahun ke depan. Program ini ditawarkan oleh pasangan calon kepada masyarakat melalui debat publik. Apabila program yang disampaikan

dapat menyentuh hati masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, maka mereka akan memilih pasangan calon yang dimaksud. Akan tetapi bila program yang ditawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka bukan hal yang mustahil bila mereka tidak memilih pasangan calon yang dimaksud.

Di samping itu performansi dan kompetensi pasangan calon sangat menentukan keberhasilannya dalam mendulang suara masyarakat pemilih. Oleh karena itu performansi dan kompetensi pasangan calon sangat dibutuhkan dalam mempengaruhi masyarakat pemilih. Di sinilah konsep pemikiran yang baik menjadi tantangan bagi pasangan calon.

B. Kampanye

Kampanye diartikan sebagai gerakan atau tindakan serentak untuk melawan atau mengadakan aksi; atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing untuk merebutkan kedudukan di parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan masyarakat pemilih dalam suatu pemilihan suara (Muhtadi, 2008:v).

Pomper (1970) dalam Lailiyah (1977: 13) menyatakan bahwa dalam ilmu politik, kampanye adalah kegiatan persuasif yang secara formal berusaha meyakinkan masyarakat bahwa satu partai peduli dan secara serius ingin memecahkan sederet isu politik secara bersama-sama, bahkan partai politik yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Jadi seorang jurkam dalam upaya menarik perhatian dan meyakinkan masyarakat pastilah dia menggunakan bahasa yang

baik dengan mengangkat isu-isu politik yang berkembang saat ini. Bahasa yang digunakan oleh jurkam tersebut disebut bahasa politik.

Kampanye dilakukan sebenarnya, ada sesuatu yang harus diketahui publik. Kampanye dilakukan bukan hanya untuk menyosialisasikan suatu gagasan, program, kepentingan, atau apapun yang dipandang perlu diketahui publik, tetapi juga untuk membentuk perilaku. Jadi karena kampanye berhubungan dengan pembentukan atau perubahan perilaku, maka banyak teori yang tidak bisa diabaikan. Kampanye banyak dilakukan dalam berbagai bidang misalnya, bidang pemerintah, politik, gereja, badan amal, bisnis/ perusahaan, dan lain-lain. Tiap-tiap bidang melakukan kampanye untuk menyosialisasikan suatu gagasan atau program untuk kepentingan bidang masing-masing. Dalam linguistik, kampanye itu termasuk bidang retorika. Kampanye itu bersifat kolektif, yakni kegiatan kolegal yang melibatkan massa bukan individual. Lembaga yang biasanya menggunakan kampanye dalam menyukseskan programnya adalah: parpol, pemerintah, gereja, badan amal, perusahaan, dan sebagainya. Kampanye dapat dilaksanakan melalui media cetak, radio, televisi, di gedung atau di lapangan. Setiap cara pelaksanaan memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Penelitian ini menekankan di televisi, tentang debat publik pasangan calon pilkada.

Dalam penelitian ini, penggunaan bahasa berkaitan dengan individu atau masyarakat secara kolektif memilih kode, bahasa untuk mengaktualisasikan ide, fakta, dan komentar dalam bentuk lisan dan tulisan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya. Penggunaan bahasa dalam kampanye dalam penelitian ini selanjutnya secara

operasional dijabarkan ke dalam pemaknaan kata, pemaknaan kalimat, dan isi kampanye.

C. Ideologi

Saat ini kata “ideologi” digunakan dalam makna yang lebih luas, yaitu untuk menyebut keyakinan-keyakinan yang dirasakan “logis” dan “wajar” oleh orang-orang yang menganutnya. Dalam artian ini ideologi tidak harus dianggap sebagai istilah negatif, karena segala sesuatu yang kita yakini dan kita pikirkan dapat disebut sebagai ideologi dalam artian ini (Thomas & Wareing (1999:54). Dalam konteks ini, ideologi tidak terbatas pada definisi tradisional yang sering diasosiasikan dengan pemikiran politik atau sistem nilai tertentu. Sebaliknya, ideologi dipahami sebagai kumpulan keyakinan, nilai, dan pandangan dunia yang dianggap “logis” dan “wajar” oleh individu atau kelompok yang menganutnya. Ini mencakup keyakinan yang tidak hanya bersifat politik, tetapi juga sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan religius.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa ideologi merupakan konstruksi sosial yang dibentuk oleh konteks budaya dan pengalaman hidup individu. Keyakinan yang dianggap “logis” atau “wajar” oleh seseorang sering kali dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya di mana mereka tumbuh dan berinteraksi. Ini menekankan bahwa ideologi tidak bersifat universal, melainkan bervariasi tergantung pada latar belakang sosial dan historis individu atau kelompok. Dengan menekankan bahwa ideologi tidak harus dianggap negatif, pernyataan ini membuka ruang untuk memahami ideologi sebagai bagian integral dari cara manusia berfikir dan berinteraksi. Banyak keyakinan yang mungkin terlihat sepele, namun berperan penting dalam kehidupan

sehari-hari dan cara individu mengambil keputusan. Ini berarti bahwa setiap orang, dengan latar belakang dan pengalaman mereka, memiliki ideologi yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap dunia.

Pernyataan ini juga menyiratkan bahwa ideologi bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Ideologi seseorang bisa berkembang atau bertransformasi berdasarkan pengalaman, pendidikan, atau interaksi dengan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun seseorang mungkin memiliki keyakinan tertentu, mereka juga terbuka untuk memikirkan ulang atau merefleksikan pandangan mereka.

Dalam konteks analisis wacana, pemahaman tentang ideologi ini penting karena membantu peneliti dan pembaca untuk memahami bagaimana keyakinan dan nilai-nilai seseorang membentuk cara mereka berbicara dan bertindak. Ini memberikan konteks yang lebih dalam untuk memahami bagaimana ideologi berperan dalam pengambilan keputusan, interaksi sosial, dan pembentukan identitas.

Ideologi dalam arti yang netral, menurut pakar filsafat seperti Noerhadi (1989:53) misalnya memberikan batasan pengertian ideologi dengan “gagasan dan nilai-nilai yang ingin dioperasionalisasikan, dengan demikian ada gerak yang bertolak dari gagasan dan nilai-nilai. Dalam pengertian ini ideologi merupakan keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap-sikap dasar rohani sebuah gerakan, kelompok sosial atau kebudayaan. Nilai ideologi dipandang dari isinya, kalau isinya baik ideologinya juga baik, kalau isinya buruk ideologinya juga buruk. Pengertian ini banyak dipakai dalam analisis ilmu-ilmu sosial dan filsafat.

Ideologi dimulai dari gagasan-gagasan dan nilai-nilai yang ingin dioperasionalisasikan. Gagasan ini bisa bersifat abstrak, seperti konsep keadilan, kebebasan, atau kesetaraan, sedangkan nilai-nilai lebih konkret dan terwujud dalam praktik sosial sehari-hari. Ideologi menjadi pendorong bagi tindakan dan gerakan sosial, karena menginspirasi individu dan kelompok untuk bertindak sesuai dengan keyakinan mereka.

Ideologi menciptakan suatu gerakan yang bertolak dari gagasan dan nilai-nilai tersebut. Dengan kata lain, ideologi tidak statis; ia bergerak dan berkembang seiring waktu, dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan budaya. Sebuah ideologi dapat mendorong tindakan kolektif, seperti protes, gerakan sosial, atau reformasi, sebagai bentuk perwujudan dari gagasan yang diyakini.

Ideologi mencakup keseluruhan sistem berpikir, yang berarti bahwa ia memberikan kerangka referensi bagi individu atau kelompok dalam memahami dunia. Sistem berpikir ini berisi nilai-nilai dasar rohani yang menjadi landasan bagi pandangan hidup dan tindakan mereka. Oleh karena itu, ideologi memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk identitas sosial dan budaya.

Noerhadi menyatakan bahwa nilai ideologi dapat dinilai berdasarkan isinya. Jika isi dari ideologi tersebut baik, maka ideologinya dianggap baik, dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahwa ideologi bukanlah entitas yang netral; ia harus dilihat dalam konteks moral dan etika. Penilaian ini dapat digunakan dalam analisis sosial dan filsafat untuk mengevaluasi konsekuensi dari ideologi tertentu terhadap masyarakat.

Pengertian ini banyak digunakan dalam analisis ilmu-ilmu sosial dan filsafat. Dalam studi sosial, ideologi dapat membantu memahami dinamika kekuasaan, struktur sosial, dan interaksi antar kelompok. Dengan menganalisis ideologi, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang mendasari perilaku sosial dan perubahan dalam masyarakat. Menurut Suseno (1992:230) istilah ideologi dipergunakan dalam banyak arti, namun pada hakikatnya semua arti itu dapat dikembalikan pada salah satu atau kombinasi dari tiga ideologi berikut. Pertama, arti ideologi sebagai 'kesadaran palsu'. Kata ideologi ini memiliki konotasi negatif, sebagai *claim* yang tidak wajar, atau sebagai teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakannya. Minimal ideologi dianggap sebagai sistem berpikir yang sudah terkena distorsi, apakah disadari atau tidak. Biasanya ideologi sekaligus dilihat sebagai sarana kelas kelompok yang berkuasa untuk melegitimasi kekuasaannya secara tidak wajar.

D. Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau lebih populer disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota.

Peraturan pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung juga telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyempurnakan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara

langsung pemerintah juga telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Tentang atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 (Hamdhan, 2007:6) Kompedium Pilkada.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia merupakan salah satu momen penting dalam sistem demokrasi, di mana masyarakat diberikan kesempatan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Tujuan utama dari pelaksanaan Pilkada adalah untuk memberikan legitimasi kepada pemimpin daerah, baik itu Gubernur, Bupati, maupun Wali Kota, yang akan menjalankan pemerintahan dan pembangunan di wilayah masing-masing. Pilkada diharapkan dapat memperkuat partisipasi politik masyarakat serta menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Dengan melibatkan rakyat secara langsung dalam proses pemilihan, diharapkan akan tercipta pemimpin yang lebih representatif dan accountable.

Dalam konteks Pilkada Gubernur (Pilgub), aturan yang mengatur proses pemilihan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan calon, tahapan pemilihan, hingga mekanisme penghitungan suara. Calon Gubernur harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti usia minimal, pendidikan, serta dukungan partai politik atau independen. Proses pemilihan sendiri terdiri dari beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, hingga penetapan hasil pemilihan. Selain itu, terdapat juga pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik

kecurangan dan memastikan bahwa proses pemilihan berjalan secara adil dan transparan.

Pilkada Gubernur juga menjadi arena kompetisi politik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk partai politik, organisasi masyarakat, dan pemilih. Melalui Pilgub, masyarakat memiliki kesempatan untuk menilai dan memilih calon pemimpin yang dianggap paling mampu mengatasi berbagai masalah di daerah, seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Selain itu, Pilgub juga menjadi sarana untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya partisipasi politik dan tanggung jawab dalam memilih pemimpin. Dengan demikian, Pilgub bukan hanya sekadar ajang pemilihan, tetapi juga merupakan proses pembelajaran demokrasi bagi masyarakat Indonesia.

E. Analisis Wacana Kritis /AWK

Analisis Wacana Kritis yang selanjutnya disebut (AWK) merupakan sebuah kajian yang digunakan di masyarakat dengan menggunakan pendekatan kritis. Menurut sejarahnya AWK mempunyai kaitan dengan Halliday (1986:36) tentang linguistik instrumental (instrumental linguistic). Linguistik instrumental ini merupakan kajian bahasa untuk memahami dunia lain misalnya sistem sosial, melalui analisis bahasa. Sebagai sebuah analisis wacana, AWK banyak memanfaatkan konsep-konsep yang menggunakan pendekatan deskriptif. Berbagai istilah teknis digunakan oleh para ahli AWK (meskipun ada sedikit perbedaan dalam pemanfaatannya) misalnya istilah transitivitas, pasif, koherensi, dan sebagainya (Fawley, 1996, Van Dijk, 2001, Fairclough, 1995 dan 1998).

AWK seperti analisis wacana deskripsi, mengkaji wacana yang di dalamnya mengandung penggunaan bahasa sebagai penyalur informasi, sehingga memungkinkan suatu masyarakat mengembangkan budaya, agama, dan adat istiadat. Fungsi bahasa sebagai penyalur informasi ini menurut Brown dan Yule (1983:1-4), bahwa fungsi bahasa untuk mengungkapkan isi akan kami deskripsikan sebagai transaksional dan fungsi bahasa yang terlibat dalam pengungkapan hubungan-hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi akan kami deskripsikan sebagai interaksional. Perbedaan kami, transaksional/interaksional secara umum sepadan dengan dikotomi-dikotomi fungsi 'representatif ekspresif' (Buhler,1934), 'referensial emotif' (Jacobson, 1960), 'ideasional interpersonal' (Halliday, 1970b), dan 'deskriptif sosial ekspresif' (Lyons, 1977).

AWK dapat diposisikan sebagai sebuah metode kajian (bisa disebut metode analisis terhadap penggunaan bahasa dengan menggunakan pendekatan kritis). Pendekatan kritis biasanya digunakan dalam mempelajari filsafat tingkat intensif. Di dunia perguruan tinggi biasanya digunakan oleh para mahasiswa pascasarjana. Bagi yang menggunakan metode ini haruslah sudah memiliki pengetahuan filsafat. AWK menyediakan teori dan metode yang bisa digunakan untuk melakukan kajian empiris tentang hubungan-hubungan antara wacana perkembangan sosial dengan kultural dalam domain-domain sosial yang berbeda.

a) Karakteristik Analisis Wacana Kritis

Dalam analisis wacana kritis (AWK/CDA), wacana di sini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Pada akhirnya, analisis wacana memang menggunakan bahasa dalam teks untuk dianalisis, tetapi bahasa yang dianalisis di sini agak berbeda

dengan studi bahasa dalam pengertian linguistik tradisional. Bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Menurut Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis melihat wacana pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai bentuk dari praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologi: ia dapat memproduksi dan mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas melalui mana perbedaan itu direpresentasikan dalam posisi sosial yang ditampilkan. Melalui wacana, sebagai contoh, keadaan yang rasis, seksis, atau ketimpangan dari kehidupan sosial dipandang sebagai suatu common sense, suatu kewajaran/alamiah, dan memang seperti itu kenyataannya.

Analisis wacana kritis melihat bahasa sebagai faktor penting, yakni bagaimana bahasa digunakan untuk melihat ketimpangan kekuasaan dalam masyarakat terjadi. Mengutip Fairclough dan Wodak, analisis wacana kritis menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing. Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis. Bahan diambil dari tulisan Teun A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak (1997:1-34).

b) **Prosedur Analisis Wacana Kritis**

Ada tiga tahap analisis yang digunakan. Pertama, deskripsi, yakni menguraikan isi dan analisis secara deskriptif atas teks. Di Sini, kita menganalisis isi dan bahasa yang dipakai dalam kampanye yang dimaksud. Kedua, interpretasi, yakni menafsirkan teks dihubungkan dengan praktik wacana yang dilakukan. Di sini, teks tidak dianalisis secara deskriptif, tetapi ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana proses produksi teks dibuat. Ketiga, eksplanasi, bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil penafsiran kita pada tahap kedua. Penjelasan itu dapat diperoleh dengan mencoba menghubungkan produksi teks itu dengan praktik sosiokultural di mana suatu media berada (Faiclough, 1998:109). Dari tiga tahapan tersebut selanjutnya diimplementasikan dalam tiga dimensi analisis wacana secara simultan dalam AWK, yaitu (1) analisis teks-teks bahasa politik, (2) analisis praksis wacana politik, dan (3) analisis praksis sosiokultural.

F. Unsur Gramatikal/ Pemaknaan Kalimat

Pemaknaan ini mencakup kajian terhadap tiga aspek gramatika, yakni (1) nilai pengalaman, (2) nilai relasional, dan (3) nilai ekspresif. Terdapat empat aspek yang dikaji dalam kepemilikan nilai pengalaman gramatikal, yakni (a) ketransitifan, (b) nominalisasi, (c) kalimat aktif-pasif, dan (d) kalimat positif-negatif

Pertama, teori ketransitivan bersumber dari fungsi representasi bahasa. Halliday (1985 : 101) memandang bahwa kepemilikan fundamental bahasa memungkinkan manusia membangun gambaran mental realitas, membuat makna dari pengalaman apa yang terjadi di

sekitarnya dan di dalamnya. Halliday menekankan pada pentingnya klausa karena klausalah yang sangat berperan dalam perwujudan berbagai macam proses itu. Terdapat tiga jenis proses utama dalam sistem ketransitivan, yakni (1) proses material, (2) proses mental atau proyeksi, dan (3) proses relasi (Halliday, 1985; Butt *et al.*, 1995). Proses-proses material adalah proses-proses melakukan (Halliday, 1985:103).

Ketransitivan berkaitan dengan bagaimana sebuah klausa dalam bahasa dapat menunjukkan hubungan antara subjek, predikat, dan objek. Dalam konteks ini, fungsi representasi bahasa menjelaskan bagaimana elemen-elemen dalam klausa tersebut merefleksikan pengalaman dan tindakan di dunia nyata. Misalnya, dalam kalimat "Anak itu memukul bola," "anak" adalah subjek yang melakukan tindakan (verba) "memukul," dan "bola" menjadi objek yang menerima tindakan tersebut. Dengan demikian, struktur kalimat ini merepresentasikan pengalaman konkret yang dapat dipahami oleh pembaca atau pendengar.

Melalui penggunaan bahasa, individu dapat menciptakan gambaran mental mengenai realitas yang mereka alami. Hal ini memungkinkan seseorang untuk merepresentasikan tidak hanya tindakan fisik tetapi juga keadaan, emosi, dan konsep yang lebih abstrak. Misalnya, kalimat seperti "Dia merasa bahagia" tidak hanya menyampaikan tindakan, tetapi juga emosi yang dialami subjek. Dengan demikian, bahasa berfungsi sebagai alat untuk mengorganisasi dan menginterpretasi pengalaman, sehingga memungkinkan individu untuk membagikan makna tersebut kepada orang lain.

Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai media komunikasi tetapi juga sebagai sarana untuk membangun makna dari berbagai pengalaman. Ketika seseorang mendeskripsikan suatu peristiwa, mereka tidak hanya melaporkan fakta, tetapi juga memberi interpretasi yang bisa berbeda tergantung pada sudut pandang mereka. Misalnya, seseorang mungkin menggambarkan hujan sebagai "berkah" atau "bencana" berdasarkan konteks dan pengalaman pribadi. Dengan demikian, ketransitivan dalam bahasa memfasilitasi penciptaan makna yang kompleks dan beragam, mencerminkan kekayaan pengalaman manusia.

Proses-proses ini mengekspresikan nosi bahwa beberapa maujud melakukan sesuatu yang mungkin saja dilakukan kepada beberapa maujud lainnya. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diajukan kepada proses ini adalah "*what did X do?*" atau "*what happened to X*" (Butt *et al.*, 1995:47). Proses material melibatkan proses perbuatan (*doing*), proses kejadian (*happening*), dan proses perilaku (*behavioral*). Partisipan yang terlibat dalam proses perbuatan dan kejadian adalah "aktor" atau "agen" dan "*goal*".

Proses material dapat diekspresikan dalam ujaran aktif atau pasif. Partisipan yang terlibat dalam proses perilaku adalah pemerilaku (*behavier*). Proses mental atau proses proyeksi adalah proses yang melibatkan proses perasaan (*sensing*), pemikiran (*thinking*), dan penglihatan (*perceiving*) (Halliday, 1985:107). Halliday juga menambah tiga subtype proses mental, yakni (1) persepsi (melihat, mendengar, dan sebagainya), (2) afeksi (menyukai, takut, dan sebagainya), dan (3) kognisi (berpikir, mengetahui, memahami, dan sebagainya) (Halliday, 1985:111). Partisipan dalam proses ini dapat

terdiri atas "pengindera" dan "fenomena". Selain itu, partisipan dalam proses ini dapat berupa "pelapor" atau "pengucap" dan "yang dilaporkan".

Proses-proses relasional dicirikan dengan keterkaitan antara partisipan dengan identitas dan periannya. Partisipan dalam proses ini dapat berupa "penyandang" (*carrier*) dan "atribut", "teridentifikasi" dan "pengidentifikasi", serta "eksisten". Terdapat sebuah catatan penting dikemukakan Halliday (1985:112) bahwa setiap bahasa mengakomodasikan sejumlah "cara-cara menjadi" (*ways of being*) yang berbeda yang diekspresikan ke dalam jenis-jenis proses relasional yang berbeda dalam klausa. Setiap bahasa memiliki kekhasan dalam proses relasional ini. Fairclough (1989:120) mengemukakan bahwa ketika seseorang memberikan representasi secara tekstual tindakan, peristiwa, dan keadaan sering terdapat pilihan antara tipe-tipe proses dan partisipan yang berbeda dan seleksi yang dibuat dapat memiliki signifikansi secara ideologis. Seseorang yang menonjolkan proses tindakan memiliki signifikansi ideologis yang berbeda dengan yang menonjolkan proses mental.

Kedua, nominalisasi adalah proses gramatikal dalam pembentukan nomina dari jenis kata yang lain, biasanya verba atau ajektif (Richards, Crystal, 1992:246; Platt, & Platt, 1992:245). Dalam gramatika transformasi klasik, nominalisasi adalah derivasi dari sebuah frasa nomina dari sebuah klausa yang mendasari. Istilah nominalisasi juga digunakan dalam klasifikasi klausa-klausa relatif (Crystal, 1991:233). Satu catatan penting dikemukakan oleh Fairclough (1989) bahwa pilihan terhadap nominalisasi tertentu mengandung signifikansi ideologis tertentu.

Ketiga, aktif dan pasif adalah persoalan voice, yakni bagaimana cara-cara sebuah bahasa mengekspresikan hubungan antara frasa verba dan frasa nomina, serta pelbagai hal yang diasosiasikan dengan hubungan itu (Richards, Platt, & Platt, 1992:401). Dua buah kalimat mungkin saja berbeda dalam *voice*-nya meskipun memiliki makna dasar yang sama. Hal ini berkaitan dengan perubahan dalam penekanan sesuai dengan pertimbangan tertentu. Dalam praktiknya, sebuah kalimat mungkin lebih sesuai (*appropriate*) atau lebih pantas dibandingkan dengan kalimat yang lain untuk situasi tertentu. Penutur mungkin saja menggunakan kalimat pasif tanpa agen (*agentless passive*), misalnya dalam kalimat *The fence has been damaged*. Kalimat seperti ini umumnya digunakan ketika penutur atau penulis tidak mengetahui atau tidak mengharapkan keadaan penyebabnya atau ketika penyebabnya terlalu jelas untuk dikemukakan. Kalimat pasif tanpa agen membiarkan kausalitas dan ketidakjelasan agen (Fairclough, 1989:125). Dalam beberapa kasus hal ini mungkin saja untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu.

Keempat, pada umumnya, nilai pengalaman diekspresikan dalam kalimat positif. Pada kasus tertentu, nilai pengalaman dikemukakan dalam kalimat negatif. Pendayagunaan kalimat negasi merupakan fenomena yang cukup menarik. Dalam suatu bahasa, negasi mendukung fungsi yang amat penting. Fungsi utama negasi ialah menyangkal atau mengingkari pernyataan lawan bicara atau pembicara yang dianggap keliru oleh pembicara itu sendiri.

Fairclough (1989:125) berpendapat bahwa negasi secara jelas memiliki nilai pengalaman sebagai cara dasar yang kita miliki dalam

membedakan apa yang bukan kasus dari apa yang memang benar-benar merupakan kasus dalam realitas. Negasi adalah cara yang sangat bermakna dalam memperebutkan elemen-elemen konteks antarteks (Fairclough, 1989:154). Pertanyaan penting yang dimunculkan adalah "apa motivasi penulis menggunakan asersi negatif jika ia dapat mengungkapkan persoalan yang sama dalam asersi positif".

Menurut Fairclough, penulis secara jelas menggunakan negatif sebagai sebuah cara untuk mengambii isu secara implisit yang sesuai dengan asersi-aseri positif. Negasi yang digunakan untuk mengungkapkan realitas dapat menjalankan tiga fungsi, yakni (1) negasi "yang sesungguhnya", (2) negasi "yang manipulatif", dan (3) negasi " yang ideologi. Nilai kedua yang dimiliki gramatika adalah nilai relasional. Nilai ini berhubungan dengan cara bagaimana gramatika mengkodekan isyarat relasi hubungan sosial timbal balik yang diperankan penghasil teks.

Terdapat tiga aspek yang dikaji, yakni (1) modus-modus kalimat, (2) modalitas, dan (3) pronomina persona. Pertama, modus kalimat berkaitan dengan cara bagaimana kalimat itu diekspresikan kepada mitra bicara. Terdapat tiga cara, yakni (1) deklaratif, (2) interogatif, dan (3) imperatif. Tiga modus kalimat itu menempatkan subjek secara berbeda. Dalam ekspresi deklaratif, posisi subjek penutur adalah sebagai pemberi informasi, sebaliknya posisi petutur sebagai penerima informasi. Dalam ekspresi interogatif, penutur dalam posisi menanyakan sesuatu kepada petutur, sebaliknya petutur berposisi sebagai penyedia informasi. Dalam ekspresi imperatif, posisi penutur adalah meminta atau memerintahkan sesuatu kepada petutur, sebaliknya petutur secara ideal berposisi sebagai pelaku yang tunduk.

Menurut Fairclough (1989:126) ketidaksimetrisan sistematis dalam pembagian modus antarpartisipan menjadi penunjuk dalam hubungan partisipan itu. Bertanya, misalnya, pada umumnya berkaitan dengan posisi kekuasaan. Bertanya dapat menjadi "tindakan" atau "informasi", dan dapat juga sebagai pemberian informasi. Deklaratif selain berarti pemberian informasi, dapat juga berarti perintah. Bertanya selain berarti permintaan informasi, dapat juga bernilai perintah. Catatan penting dikemukakan oleh Fairclough (1989) bahwa modus kalimat dalam penggunaan yang sebenarnya itu jauh lebih rumit dari yang digambarkan di atas. Dua alasan dikemukakan, yakni (1) tidak ada hubungan satu antara modus kalimat dan pemosisian subjek, dan (2) terdapat posisi subjek yang lebih banyak dan beragam daripada yang sudah diidentifikasi selama ini.

Kedua, modalitas relasional adalah persoalan autoritas satu partisipan dalam hubungan dengan partisipan lainnya. Modalitas mempergunakan autoritas penulis atau penutur. Dalam bahasa Indonesia, kajian yang mendalam tentang modalitas dalam bahasa Indonesia sudah dilaksanakan oleh Alwi (1991). Hasil penelitian Alwi menunjukkan bahwa terdapat empat golongan besar modalitas, yakni (1) modalitas intensional, (2) modalitas epistemik, (3) modalitas deontik, dan (4) modalitas dinamik.

Modalitas intensional berkaitan dengan fungsi instrumental. Bahasa digunakan untuk menyatakan sikap pembicara sehubungan dengan peristiwa nonaktual yang diungkapkannya. Bagi mitra bicara, menurut Alwi (1991:36), hal itu berarti bahwa apa yang diutarakan pembicara itu merupakan dorongan untuk mengaktualisasikan peristiwa yang bersangkutan. Atas dasar itu, melalui tuturan yang dikemukakannya,

seseorang dapat menyatakan 'keinginan', 'harapan', 'ajakan', 'pemberian' dan 'permintaan'.

Modalitas epistemik menurut pandangan Palmer (1974) merupakan penilaian penutur terhadap kemungkinan dan keperluan bahwa sesuatu itu demikian atau tidak demikian (Alwi, 1991:90). Modalitas epistemik mengandung makna epistemik. Makna ini muncul jika suatu bentuk menyatakan pengetahuan, keyakinan, kepercayaan, atau pendapat pembicara tentang proposisi yang diungkapkannya itu. Sikap pembicara yang didasari oleh kekurangtahuan atau kekurangyakinan terhadap kebenaran proposisi dapat digambarkan sebagai 'kemungkinan', 'keteramalan', 'keharusan', atau 'kepastian'.

Modalitas deontik berhubungan dengan kewajiban. Sikap pembicara terhadap peristiwa pada modalitas deontik didasarkan pada aidah sosial, baik yang berupa kewenangan pribadi atau kewenangan resmi (Alwi, 1991:163). Dalam modalitas deontik terkandung makna bahwa pembicara sebagai sumber deontik mengharuskan, mengizinkan, dan melarang terjadinya suatu peristiwa atau perbuatan. Modalitas ini mengandung makna 'perintah', 'izin', dan 'larangan'.

Modalitas dinamik mempersoalkan sikap pembicara terhadap aktualisasi peristiwa yang ditentukan oleh perikeadaan yang lebih bersifat empiris. Yang dijadikan tolok ukur oleh pembicara dalam modalitas dinamik adalah hukum alam, sementara itu dalam modalitas deontik adalah kaidah sosial (Alwi, 1991:233). Modalitas dinamik berciri objektif. Dalam modalitas dinamik terkandung makna "mampu atau sanggup". Ketiga, pronomina persona berkenaan dengan kehadiran diri, yakni bagaimana penutur menghadirkan dirinya di

hadapan mitra bicara. Pronomina persona adalah seperangkat pronomina yang merepresentasikan kategori gramatikal dari persona. Strategi kehadiran diri berkenaan dengan pronomina persona pertama. Penggunaan pronomina persona berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan dan solidaritas. Untuk menunjukkan kekuasaannya, pembicara dalam suatu bahasa biasanya dapat menggunakan kata atau bentuk kata tertentu. Cara yang sangat umum dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan dan solidaritas ialah memilih kata yang tepat untuk memanggil mitra bicara serta menggunakan kata-kata tertentu pula.

Nilai ketiga yang dimiliki gramatika adalah nilai ekspresif. Nilai ekspresif gramatika ditunjukkan oleh modalitas ekspresif. Modalitas menjadi ekspresif jika modalitas adalah persoalan otoritas penutur atau penulis yang berkenaan dengan kebenaran atau kemungkinan representasi realitas. Dalam modalitas ekspresif terkandung makna 'kemungkinan', 'izin', 'kepastian', 'kewajiban', termasuk juga 'ketidakmungkinan'. Menurut Fairclough (1989:129) kepentingan ideologis dalam tuntutan terhadap "autentisitas" atau "pengetahuan" dibuktikan melalui bentuk-bentuk modalitas.

BAB III

MENDEKATI DEBAT PUBLIK DENGAN LANGKAH KRITIS

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975:4) menyatakan, "*Qualitative methodologies refer to research procedures which produces descriptive data : people's own written or spoken words and observable behavior.*" (metodologi kualitatif mengacu pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa data tertulis atau lisan dan perilaku yang bisa diobservasi).

Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan beberapa pertimbangan, antara lain (1) sumber data dalam penelitian ini merupakan situasi wajar, yaitu pasangan calon Khofifah Indar Parawangsa dan Syaifulah Yusuf melaksanakan debat publik melalui media televisi: (2) peneliti sebagai instrumen penelitian mengadakan pengamatan, perekaman, dan pencatatan, (3) data-data/teks debat publik kedua pasangan calon yang dikumpulkan mayoritas data deskriptif tidak mengutamakan angka-angka atau statistik tetapi tidak menolak data kuantitatif, (4) penelitian ini mengutamakan proses maupun produk, (5) penelitian ini mencoba menemukan unsur kebahasaan dan isi debat publik, (6) penelitian mengutamakan data langsung dari televisi yang diperoleh oleh peneliti, (7) penelitian ini mengutamakan pandangan emik yaitu mementingkan pandangan informasi dalam memandang dan menafsirkan dunia dari segi pendiriannya, (8) penelitian ini melakukan analisis data sejak awal penelitian sampai akhir penelitian atau selama penelitian berlangsung, (9) penelitian ini bukan untuk menguji hipotesis yang berdasarkan teori-teori tertentu, tetapi untuk membangun atau menemukan teori-teori yang berdasarkan pada data (Nasution 1988 : 9-11; Moleong, 1990 : 4-7).

A. Objek Penelitian

Penelitian ini berfokus pada objek analisis yang penting dalam konteks politik, yaitu teks bahasa yang muncul dalam debat publik pasangan calon Khofifah Indar Parawansa dan Syaifulah Yusuf pada Pilgub Jawa Timur tahun 2018. Debat publik ini, yang disiarkan melalui media televisi, tidak hanya berfungsi sebagai ajang penyampaian visi dan misi para calon, tetapi juga sebagai arena di mana makna, simbol, dan ideologi dipertaruhkan. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, penelitian ini berupaya memahami pemaknaan yang terkandung dalam setiap ucapan dan argumen yang disampaikan oleh kedua pasangan calon. Dengan meneliti teks bahasa ini, penelitian ini bertujuan untuk mengungkap dinamika sosial, politik, dan kultural yang mempengaruhi cara pemilih memahami dan merespons pesan-pesan yang disampaikan dalam debat tersebut.

BAB IV

ANALISIS LANGKAH KRITIS DALAM DEBAT PUBLIK

A. Nilai Pengalaman

1) Ketransitivan

Teori ketransitivan ini bersumber dari fungsi representasional bahasa, yakni fungsi bahasa yang bertugas (1) menyandikan (*encode*) pengalaman tentang dunia dan (2) membawa gambaran tentang realitas. Gambaran mental itu dapat berupa struktur frasa, klausa, dan kata. Salah satu pertanyaan pokok yang dimunculkan Fairclough (1989: 120) dalam menganalisis wacana dengan paradigma kritis adalah “tipe-tipe proses dan partisipan apa saja yang menonjol”. Seperti sudah dipaparkan pada bab II, istilah “proses” dan “partisipan” dalam pandangan Fairclough (1989) diacukan kepada sistem atau teori ketransitivan. Dalam pandangan Halliday (1985;1994) sistem ketransitivan (*transitivity system*) ini.

Kajian Terhadap ketransitivan akan menghasilkan perian tentang berbagai pilihan proses dan partisipan dalam klausa. Sebagai contoh, analisis terhadap teks politik yang dihasilkan oleh cagub dalam pemilu 2018 diperoleh informasi bahwa klausa material mendominasi keseluruhan proses yang digunakan.

Ketransitivan Kalimat yang Digunakan oleh Paslon 1

Salah satu contoh ketransitivan yang digunakan oleh paslon 1 berikut ini: Secara deskriptif kalimat di bawah ini dapat dianalisis sebagai berikut. *Aktor* berupa kata ini, yakni sebagai Kita. Beri dukungan sepenuhnya untuk bisa memperoleh sebagai proses perbuatan. Verba “beri dukungan sepenuhnya untuk bisa memperoleh” memiliki makna

benar-benar mendukung. Pendidikan gratis di tingkat SMA dan di tingkat SMK untuk muridnya, sebagai goal yaitu tujuan yang harus didapatkan oleh para siswa tingkat SMA dan SMK untuk mendapatkan beaya atau sekolah gratis dari pemerintahan Gubernur Kofifah Indar Parawangsa.

Dengan demikian dalam kutipan di bawah ini, secara interpretatif dan eksplanatif analisis terhadap ideologi penghasil teksnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, pandangan penutur terhadap para siswa disampaikan lewat verba yang menduduki proses itu. Kita harus memperjuangkan kepada calon siswa dan memberi dukungan sepenuhnya agar mereka bisa meraih sekolah yang dinginkannya. Calon siswa yang harus diperjuangkan agar dapat sekolah gratis di SMA dan SMK yang dinginkannya. Kedua, lewat *goal* kalimat di bawah, aktor dapat mendorong dan mempengaruhi masyarakat agar para siswa dapat pendidikan gratis di SMA dan SMK. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Kita	beri dukungan sepenuhnya untuk bisa memperoleh	pendidikan gratis di tingkat SMA dan di tingkat SMK untuk muridnya
<i>Aktor</i>	<i>proses perbuatan</i>	<i>Goal</i>

Ketransitivan Kalimat yang Digunakan oleh Paslon 2

Secara deskriptif kalimat di bawah ini dapat dianalisis sebagai berikut. *Aktor* berupa kata 'kita'. 'ingin menyampaikan bahwa yang gratis tapi juga tetap harus dijaga' sebagai proses perbuatan dan sebagai goal yaitu kata 'kualitas'.

Dengan demikian dalam kutipan di bawah ini, secara interpretatif dan eksplanatif analisis terhadap ideologi penghasil teksnya dapat

dikemukakan sebagai berikut, bahwa Syaifullah Yusuf dan pendukungnya ingin menyampaikan bahwa pendidikan gratis tidak hanya pada biaya sekolah ini, tetapi yang lebih penting lagi masyarakat dunia pendidikan tetap harus menjaga kualitasnya. Pandangan penutur terhadap para siswa disampaikan lewat verba yang menduduki proses itu. Kita harus memperjuangkan calon siswa patau para siswa pada umumnya dan memberi dukungan sepenuhnya agar mereka bisa meraih sekolah yang dinginkannya. Calon siswa yang harus diperjuangkan agar dapat sekolah gratis di SMA dan SMK yang dinginkannya. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Kita	ingin menyampaikan bahwa yang gratis tapi juga tetap harus dijaga	Kualitasnya
<i>Aktor</i>	<i>proses perbuatan</i>	<i>Goal</i>

(2) Kalimat Positif- Negatif

Pada umumnya, nilai pengalaman diekspresikan dalam kalimat positif. Pada kasus tertentu, nilai pengalaman dikemukakan dalam kalimat negatif. Pendayagunaan kalimat negasi merupakan fenomena yang cukup menarik. Dalam suatu bahasa, negasi mendukung fungsi yang amat penting. Fungsi utama negasi ialah menyangkal atau mengingkari pernyataan lawan bicara atau pembicara yang dianggap keliru oleh pembicara itu sendiri.

Fairclough (1989:125) berpendapat bahwa negasi secara jelas memiliki nilai pengalaman sebagai cara dasar yang kita miliki dalam membedakan apa yang bukan kasus dari apa yang memang benar-benar merupakan kasus dalam realitas. Negasi dalam bahasa berfungsi sebagai mekanisme untuk menyatakan ketidakadaan atau penolakan terhadap suatu proposisi. Dengan menggunakan kata-kata atau frasa negatif, pembicara dapat menjelaskan apa yang tidak benar, tidak ada,

atau tidak terjadi, yang pada gilirannya membantu mendefinisikan dan membedakan realitas yang ada. Misalnya, dalam kalimat "Dia tidak pergi ke sekolah," penggunaan negasi "tidak" menunjukkan bahwa tindakan pergi ke sekolah tidak terjadi, sehingga memberikan informasi yang jelas tentang situasi.

Fairclough menekankan bahwa negasi tidak hanya bersifat linguistik tetapi juga memiliki nilai pengalaman. Dalam konteks ini, negasi berfungsi untuk membantu individu memahami dan menjelaskan pengalaman mereka dengan cara yang lebih jelas. Ketika seseorang menyatakan bahwa sesuatu tidak terjadi, mereka berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang realitas. Sebagai contoh, jika seseorang mengatakan "Tidak ada makanan di meja," pernyataan ini bukan hanya mengekspresikan ketiadaan makanan, tetapi juga memberikan konteks bagi situasi yang lebih besar, seperti kemungkinan kelaparan atau ketidakberdayaan.

Penggunaan negasi juga memiliki konsekuensi dalam komunikasi, karena dapat mempengaruhi cara orang lain memahami informasi yang disampaikan. Negasi membantu memperjelas batasan-batasan dari pernyataan yang dibuat, yang sangat penting dalam konteks diskusi, argumentasi, atau analisis kritis. Misalnya, ketika dalam diskusi politik seseorang berkata, "Kebijakan ini tidak adil," negasi di sini menandakan penilaian moral dan memberi tahu audiens bahwa ada sesuatu yang salah dalam kebijakan tersebut, sehingga mengundang perhatian dan refleksi lebih lanjut.

Negasi adalah cara yang sangat bermakna dalam memperebutkan elemen-elemen konteks antarteks (Fairclough, 1989:154). Pertanyaan

penting yang dimunculkan adalah "apa motivasi penulis menggunakan asersi negatif jika ia dapat mengungkapkan persoalan yang sama dalam asersi positif". Menurut Fairclough, penulis secara jelas menggunakan negatif sebagai sebuah cara untuk mengambil isu secara implisit yang sesuai dengan asersi-aseri positif. Negasi yang digunakan untuk mengungkapkan realitas dapat menjalankan tiga fungsi, yakni (1) negasi "yang sesungguhnya", (2) negasi "yang manipulatif", dan (3) negasi " yang ideologis".

Dalam wacana politik Indonesia era reformasi, pilihan kalimat positif lebih banyak digunakan oleh negatif, yakni "tidak", "bukan", "jangan". Untuk memperoleh pemahaman penggunaan kalimat negatif dalam debat publik pemilukada/pilgub Jawa Timur 2018

Kalimat Positif dan Negatif yang digunakan Kofifah

Secara deskriptif dalam kutipan di bawah ini terdapat penggunaan bentuk negatif, yakni bentuk negatif pada kalimat tersebut ditandai oleh "Jawa Timur pekerjaan rumah yang terkait dengan pengangguran hingga saat ini juga masih belum berhasil diselesaikan". Kalimat pada kutipan tersebut mengandung proposisi negatif, yakni "pengangguran hingga saat ini belum berhasil diselesaikan." Mengikuti cara berpikir Leech (1983:164), kalimat dapat dianalisis sebagai berikut. Kalimat tersebut dibangun dari proposisi negatif, yakni "pengangguran hingga saat ini juga masih belum berhasil diselesaikan". Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa penutur memilih menggunakan kalimat negatif? Jika dipositifkan menjadi:

"Menurut saya sebetulnya pengangguran saat ini sudah berhasil diselesaikan sekarang ini dari pihak pemerintah itu kami nanti harus

bisa membuka lapangan pekerjaan 550.000 pertahun dengan cara peningkatan melalui bidang pariwisata (D2 K 815, 42).

Kalimat Positif dan Negatif yang digunakan oleh paslon 2

Secara deskriptif dalam kutipan di bawah ini terdapat penggunaan bentuk negatif, yakni bentuk negatif pada kalimat tersebut ditandai oleh 'menangatasi masalah kesenjangan ekonomi. Bentuk positif pada kutipan di bawah ini: mendorong kolaborasi gotong royong dan mensinergiskan seluruh kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Secara interpretatif dan eksplanasi, Kalimat pada kutipan tersebut mengandung proposisi negatif, yakni masalah kesenjangan ekonomi Indonesia saat ini sudah luar biasa sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Dalam hal ini pemerintah harus segera mendorong dan mensinergiskan seluruh kekuatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditetapkan. Apabila tidak dilakukan dengan cepat dan cermat akan membawa rakyat pada penderitaan. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Bidang ekonomi setidaknya-tidaknya menasar dua hal pokok pertama menangatasi masalah kesenjangan ekonomi dan mendorong kolaborasi gotong royong dan mensinergiskan seluruh kekuatan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing (D2 S 110-115, 25).

Pernyataan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kesenjangan ekonomi sebagai masalah yang serius. Dengan menyebutkan "menangani masalah kesenjangan ekonomi," terdapat penekanan pada perlunya upaya yang sistematis untuk mengurangi ketimpangan

antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi yang berbeda. Ini mencerminkan kesadaran sosial yang mendalam dan tanggung jawab untuk menciptakan kesejahteraan yang lebih merata di dalam masyarakat.

Menggandengkan kesenjangan ekonomi dengan "kolaborasi gotong royong" menunjukkan pentingnya kerja sama antara berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Penggunaan istilah "gotong royong," yang berasal dari budaya Indonesia, memperkuat ide bahwa pendekatan berbasis komunitas dan solidaritas sosial adalah kunci dalam membangun ekonomi yang inklusif. Ini menunjukkan bahwa penyelesaian masalah tidak hanya tergantung pada kebijakan pemerintah semata, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat.

Pernyataan mengenai "mensinergiskan seluruh kekuatan" menyoroti pentingnya integrasi antara berbagai sumber daya dan aktor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sini, wacana tersebut mengisyaratkan perlunya kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan ekonomi bersama. Dalam konteks ini, sinergi menjadi kata kunci yang menghubungkan berbagai elemen, mulai dari modal, tenaga kerja, hingga inovasi teknologi.

Pernyataan ini tidak hanya fokus pada pemecahan masalah, tetapi juga pada hasil yang ingin dicapai, yaitu "pertumbuhan ekonomi dan daya saing." Ini menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan membangun kolaborasi tidak hanya dimaksudkan untuk kesejahteraan sosial, tetapi juga untuk meningkatkan posisi kompetitif negara atau daerah dalam konteks global. Dalam analisis wacana, ini

mencerminkan adanya agenda ekonomi yang lebih luas yang berfokus pada pencapaian tujuan jangka panjang.

B. Nilai Relasional

Nilai kedua yang dimiliki gramatikal adalah nilai relasional. Nilai ini berhubungan dengan cara bagaimana gramatikal mengodekan isyarat relasi hubungan sosial timbal balik yang diperankan penghasil teks. Terdapat tiga aspek yang dikaji, yakni (1) modus-modus kalimat, (2) modalitas, dan (3) pronomina persona.

Nilai relasional dalam aspek gramatikal mengacu pada cara bahasa merepresentasikan dan mengkodekan hubungan sosial antar individu dalam komunikasi. Dalam konteks ini, gramatikal tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga mencerminkan dinamika interaksi sosial antara penghasil teks (penutur) dan penerima teks (pendengar atau pembaca). Tiga aspek yang dikaji dalam nilai relasional ini adalah modus kalimat, modalitas, dan pronomina persona.

Modus kalimat mengacu pada cara pernyataan diungkapkan, baik dalam bentuk deklaratif, interogatif, imperatif, maupun eksklamatif. Setiap modus memberikan nuansa yang berbeda dalam komunikasi. Misalnya, kalimat deklaratif digunakan untuk menyampaikan informasi atau fakta, sedangkan kalimat interogatif digunakan untuk meminta informasi. Modus imperatif, di sisi lain, digunakan untuk memberi perintah atau instruksi. Melalui pilihan modus kalimat, penutur dapat mengatur dinamika kekuasaan, kepentingan, dan pengaruh dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, penggunaan kalimat imperatif dapat menunjukkan otoritas, sementara kalimat interogatif bisa mencerminkan sikap keterbukaan.

Modalitas merujuk pada cara penutur mengekspresikan sikap atau pandangan mereka terhadap kebenaran atau kepastian suatu proposisi. Modalitas dapat dilihat melalui penggunaan kata-kata atau frasa yang

menunjukkan kemungkinan, kewajiban, izin, atau kemampuan. Contohnya, penggunaan kata-kata seperti "harus," "boleh," "mungkin," dan "pasti" memberikan informasi tentang sejauh mana penutur menganggap suatu pernyataan benar atau penting. Dengan demikian, modalitas tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan hubungan antara penutur dan pendengar, mengisyaratkan niat, dan mengatur interaksi sosial.

Pronomina persona berkaitan dengan penggunaan kata ganti yang menunjukkan posisi penutur, pendengar, atau pihak ketiga dalam konteks komunikasi. Penggunaan pronomina seperti "saya," "kamu," "dia," atau "kita" dapat mencerminkan hubungan sosial dan hierarki antara penghasil teks dan penerima. Misalnya, penggunaan "saya" dan "kamu" menciptakan hubungan yang lebih intim atau setara, sementara penggunaan "anda" cenderung lebih formal. Dengan demikian, pilihan pronomina tidak hanya berfungsi untuk menggantikan nama, tetapi juga untuk membangun atau menciptakan jarak sosial, menunjukkan rasa hormat, atau mengungkapkan kedekatan emosional.

Secara keseluruhan, nilai relasional dalam gramatikal memainkan peran penting dalam interaksi sosial, karena mengkodekan isyarat hubungan antara individu yang terlibat dalam komunikasi. Melalui pemilihan modus kalimat, modalitas, dan pronomina persona, penutur dapat menciptakan makna yang lebih dalam dan kompleks, mencerminkan dinamika sosial, dan membangun hubungan yang lebih bermakna dalam konteks komunikasi.

1) Modus Kalimat

Modus kalimat berkaitan dengan cara bagaimana kalimat itu diekspresikan kepada mitra bicara. Terdapat tiga cara, yakni (1) deklaratif, (2) interogatif, dan (3) imperatif. Tiga modus kalimat itu menempatkan subjek secara berbeda. Dalam ekspresi deklaratif, posisi

penutur adalah sebagai pemberi informasi, sebaliknya posisi petutur sebagai penerima informasi.

Dalam kalimat deklaratif, penutur berfungsi sebagai pemberi informasi. Kalimat ini digunakan untuk menyampaikan pernyataan, fakta, atau opini dengan tujuan memberikan pengetahuan kepada pendengar. Struktur kalimatnya biasanya mengikuti pola subjek-predikat-objek (SPO) yang jelas. Contoh kalimat deklaratif adalah "Cuaca hari ini sangat cerah." Dalam hal ini, penutur menyampaikan informasi kepada pendengar tanpa mengharapkan tanggapan langsung. Posisi penutur di sini lebih dominan, karena mereka mengontrol informasi yang disampaikan, sementara pendengar berperan pasif sebagai penerima informasi.

Kalimat interogatif digunakan untuk meminta informasi atau klarifikasi dari pendengar. Dalam modus ini, posisi penutur berubah menjadi pencari informasi, sementara pendengar menjadi sumber informasi yang diharapkan. Contoh kalimat interogatif adalah "Apakah kamu sudah makan?" Di sini, penutur mengharapkan respons dari pendengar dan menciptakan interaksi dua arah. Dengan menggunakan modus interogatif, penutur menunjukkan ketertarikan atau kebutuhan untuk mendapatkan informasi, sehingga posisi sosial antara penutur dan pendengar menjadi lebih setara, di mana keduanya terlibat dalam dialog.

Kalimat imperatif digunakan untuk memberikan perintah, instruksi, atau ajakan kepada pendengar. Dalam hal ini, posisi penutur adalah sebagai pengarah atau pengendali, sementara pendengar diharapkan untuk melaksanakan tindakan yang diperintahkan. Contoh kalimat

imperatif adalah "Tolong tutup pintunya." Pada modus ini, penutur memegang otoritas lebih besar karena mereka mengarahkan tindakan pendengar. Walaupun ada nuansa permohonan dalam kalimat imperatif, secara umum, penggunaan kata kerja perintah menempatkan penutur dalam posisi yang lebih kuat dalam hubungan sosial.

Modus Kalimat yang Digunakan Paslon Kofifah

Secara deskriptif kalimat kutipan di bawah dapat dianalisis sebagai berikut. Berdasarkan pemikiran Leech (1983:114), dari kacamata sintaksis, paragraf tersebut dibangun oleh dua "klausa deklaratif". Klausa deklaratif pertama, yakni "Jawa Timur pekerjaan rumah yang terkait dengan pengangguran hingga saat ini juga masih belum berhasil diselesaikan," Kalimat ini menempatkan penutur sebagai pemberi informasi, sedangkan petutur sebagai penerima informasi. Dalam kalimat pertama, penutur "menyatakan" sesuatu kepada orang lain. Klausa lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan kalimat pertama adalah kalimat kedua.

Klausa deklaratif kedua, yakni " kami nanti harus bisa membuka lapangan pekerjaan 550.000 pertahun dengan cara peningkatan melalui bidang pariwisata". Dalam klausa tersebut penutur dapat berposisi sebagai pemberi informasi, dapat juga berperan sebagai pemerintah. Sementara itu, petutur dapat berperan sebagai penerima informasi.

Secara interpretatif dan eksplanatif kalimat pada kutipan tersebut menunjukkan ideologi penghasil teksnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, penutur, dalam hal ini Kofifah, mengatakan bahwa

pekerjaan rumah untuk rakyat Jawa Timur yaitu mengenai pengangguran yang hingga saat ini belum berhasil terselesaikan. Kedua, Kofifah mengajak kepada jajarannya untuk membuka lapangan pekerjaan baru sejumlah 550.000 per tahun melalui bidang pariwisata.. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut.

Jawa Timur pekerjaan rumah yang terkait dengan pengangguran hingga saat ini juga masih belum berhasil diselesaikan, kami nanti harus bisa membuka lapangan pekerjaan 550.000 pertahun dengan cara peningkatan melalui bidang pariwisata (D2 K 815, 42).

Pernyataan ini umumnya menggunakan modus indikatif, di mana fakta dan kondisi yang ada saat ini dijelaskan secara langsung. Misalnya, kalimat "pekerjaan rumah yang terkait dengan pengangguran hingga saat ini juga masih belum berhasil diselesaikan" menyatakan kondisi yang nyata dan menggambarkan situasi pengangguran yang sedang dihadapi di Jawa Timur. Modus indikatif ini menunjukkan bahwa pengangguran adalah isu yang diakui dan perlu perhatian.

Bagian "kami nanti harus bisa membuka lapangan pekerjaan 550.000 per tahun" menunjukkan imperatif tidak langsung. Meskipun tidak secara eksplisit menyampaikan perintah, frasa "kami nanti harus bisa" mencerminkan komitmen dan tanggung jawab yang harus diambil oleh pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah atau pemangku kebijakan. Ini menunjukkan niat untuk bertindak dan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah pengangguran.

Frasa "dengan cara peningkatan melalui bidang pariwisata" menyiratkan bahwa tindakan yang diusulkan adalah harapan atau rencana yang harus diwujudkan. Penggunaan kata "dengan cara"

menunjukkan bahwa terdapat keinginan atau potensi untuk mencapai tujuan tersebut, tetapi masih ada tantangan yang harus dihadapi. Ini menciptakan nuansa subjuktif, di mana hasil dari tindakan tersebut belum pasti dan bergantung pada pelaksanaan dan keberhasilan strategi yang diambil.

Modus Kalimat yang Digunakan Paslon Syaifullah Yusuf

Secara deskriptif kalimat kutipan di bawah dapat dianalisis sebagai berikut. Berdasarkan pemikiran Leech (1983:114), dari kacamata sintaksis, paragraf tersebut dibangun oleh dua klausa, yaitu “klausa imperatif”. Klausa imperatif pertama, yakni “ Alhamdulillah penurunan kemiskinan di Jawa Timur ke depan harus kita atasi” Klausa ini menempatkan penutur sebagai perintah, sedangkan petutur sebagai penerima perintah. Dalam klausa pertama, penutur “memerintahakan” kepada jajaran pemerintahan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini.

Klausa imperatif kedua, yakni “ kami nanti harus bisa membuka lapangan pekerjaan 550.000 pertahun dengan cara peningkatan melalui bidang pariwisata”. Dalam klausa tersebut penutur dapat berposisi sebagai perintah, sedangkan petutur dapat berperan sebagai penerima perintah.

Secara interpretatif dan eksplanatif kalimat pada kutipan tersebut menunjukkan ideologi penghasil teksnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, penutur, dalam hal ini Syaifullah Yusuf, mengatakan bahwa kemiskinan di Jawa Timur ke depan harus kita atasi dengan cara pertumbuhan ekonomi harus diratakan ke seluruh pelosok Jawa Timur terutama untuk masyarakat pedesaan harus bisa menikmati pertumbuhan ekonomi ini. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi ini

hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi jangan terjadi di Surabaya saja, akan tetapi harus berkembang merata ke seluruh kabupaten atau kota yang lain di seluruh Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Alhamdulillah penurunan kemiskinan di Jawa Timur ke depan harus kita atasi, gimana cara mengatasinya, pertumbuhan harus kita meratakan tidak bisa hanya bertumbuh hanya di Surabaya (D1 S. 860, 19).

Pernyataan "Alhamdulillah penurunan kemiskinan di Jawa Timur ke depan harus kita atasi" menggunakan modus indikatif, di mana kondisi yang dihadapi di Jawa Timur dijelaskan secara faktual. Penggunaan frasa "penurunan kemiskinan" menunjukkan bahwa ada perbaikan yang terjadi, tetapi dengan penekanan pada tanggung jawab untuk terus mengatasi masalah kemiskinan. Modus ini mencerminkan pengakuan terhadap keadaan yang ada, serta menunjukkan sikap optimis terhadap kemajuan yang telah dicapai.

Bagian "gimana cara mengatasinya" secara langsung mengajukan pertanyaan, menunjukkan adanya keingintahuan dan pencarian solusi terhadap masalah yang ada. Meskipun tidak secara eksplisit menggunakan tanda tanya, ungkapan ini mencerminkan kebutuhan untuk berdiskusi dan berpikir kritis tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk melanjutkan upaya penanganan kemiskinan. Ini menciptakan ruang untuk dialog dan kolaborasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Pernyataan "pertumbuhan harus kita meratakan" memiliki nuansa imperatif. Frasa ini menunjukkan keharusan dan komitmen untuk

meratakan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Jawa Timur, bukan hanya di Surabaya. Modus imperatif ini menekankan pentingnya tindakan kolektif yang harus diambil oleh semua pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dirasakan secara merata di seluruh provinsi.

Bagian "tidak bisa hanya bertumbuh hanya di Surabaya" menyiratkan harapan atau rencana untuk menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Ungkapan ini mencerminkan pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terpusat di satu daerah tidaklah berkelanjutan dan dapat menimbulkan ketimpangan. Ini menciptakan nuansa subjektif, di mana terdapat aspirasi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih merata, meskipun pelaksanaannya masih tergantung pada tindakan yang diambil ke depan.

2) Pronomina Persona

Strategi cagub dalam komunikasi politik adalah persoalan bagaimana cagub memilih bentuk pronomina persona ketika berkomunikasi dengan massa pendukung atau partisipan lain. Pilihan strategi kehadiran diri berimplikasi terhadap jarak sosial yang tercipta antara penutur dan petuturnya. Beberapa strategi kehadiran diri yang digunakan dan dipilih oleh cagub dalam komunikasi adalah (1) penggunaan pronomina persona jamak **kita**, (2) penggunaan pronomina jamak **kami**, (3) penggunaan pronomina persona tunggal **saya**, dan (4) penggunaan nomina tertentu sebagai pengganti pronomina.

Ketiga, pronomina persona berkenaan dengan kehadiran diri, yakni bagaimana penutur menghadirkan dirinya di hadapan mitra bicara. Pronomina persona adalah seperangkat pronomina yang merepresentasikan kategori gramatikal dari persona. Strategi kehadiran

diri berkenaan dengan pronomina persona pertama. Penggunaan pronomina persona berkaitan dengan hubungan antara kekuasaan dan solidaritas. Untuk menunjukkan kekuasaannya, pembicara dalam suatu bahasa biasanya dapat menggunakan kata atau bentuk kata tertentu. Cara yang sangat umum dilakukan untuk menunjukkan kekuasaan dan solidaritas ialah memilih kata yang tepat untuk memanggil mitra bicara serta menggunakan kata-kata tertentu pula.

Menurut Djajasudarma (1999:45), tentang pronomina persona sebagai berikut. (1) "*Saya*, yang dipakai dalam corak bahasa akrab ataupun yang adab, kalau pembicara menyertakan faktor ketakziman. Dalam corak bahasa itu diindahkan 'jarak psikologis' di antara pembicara dengan kawan pembicara. Orang yang belajar bahasa Indonesia lebih aman memakai kata *saya* dalam situasi formal maupun informal karena *saya* tak bermarkah – lebih bersifat netral (tidak mempertimbangkan akrab/tidak). *Aku* sebagai bentuk pronomina persona pertama yang asli dalam bahasa Indonesia lebih fleksibel dari *saya* (sebab *aku* mempunyai bentuk terikat *-ku*, sedangkan *saya* tidak). (2) *Kami*, yang tidak saja mengacu kepada orang pertama jamak, tetapi juga dapat dipakai untuk mengacu kepada orang pertama tunggal, dan yang dipakai dalam corak bahasa yang resmi, kalau pembicara sadar mengindahkan 'jarak psikologis' yang lebih besar lagi. Dengan sikap itu, ia seakan-akan hendak menyembunyikan kepribadiannya. Ia tidak ingin mengacu dirinya secara langsung (ia jamak, tetapi juga dapat dipergunakan untuk mengacu orang pertama tunggal. Sebagai pengacu orang pertama tunggal, mungkin masih terbatas pada daerah tertentu (Jakarta dan wilayah pengaruhnya; daerah Jawa Barat atau masyarakat bahasa Sunda menggunakan *kami* sebagai pronomina persona pertama dengan mempertimbangkan 'jarak psikologis' sebagai pembicara, yang kemudian terdesak oleh leksem keakraban).

Orang yang tidak ingin menggunakan kata aku atau saya untuk mengacu dirinya, berhadapan dengan pilihan *kami* atau *kita*. *Kami* (yang mengecualikan) dirasakannya terlalu besar jarak psikologisnya terhadap yang diajak bicara. Sebaliknya kata *kita* (yang merangkum) agaknya menimbulkan perasaan solidaritas di antara kelompok yang senasib dan sebaya.

Pronomina yang Digunakan Paslon Kofifah

Strategi Koifah dalam komunikasi politik menurut hasil pencermatan peneliti menggunakan kata **kita**. Secara deskriptif kutipan di bawah ini merupakan sebagian dari debat publik Pilkada Jatim 2018. Kalimat yang diangkat dalam debat publik kali ini, yaitu, “**Kita** juga ingin menyampaikan soal *public transportation*, bagaimana **kita** berharap bahwa akan ada tambahan kapal *express* untuk daerah.” Aktor menggunakan pronomina persona kita pada dua klausa. Klausa pertama “**Kita** juga ingin menyampaikan soal *public transportation*.” Klausa kedua “bagaimana **kita** berharap bahwa akan ada tambahan kapal *express* untuk daerah.”

Secara interpretatif dan eksplanatif kutipan ini dapat dianalisis ideologi penghasil teksnya sebagai berikut. Pertama, penutur/Kofifah memosisikan diri bersama-sama dengan masyarakat pendukungnya menyampaikan soal *public transportation*. Soal angkutan umum ini harus diperjuangkan kepada pemerintah pusat. Kedua, Kofifah menggunakan pronomina persona **kita**, dengan harapan akan ada tambahan kapal *express* untuk daerah Jawa Timur, sehingga masyarakat bisa menikmati angkutan umum tersebut dalam kebutuhan hidup sehari-hari yang nantinya dapat mempermudah akses usaha dan bisnis

seluruh masyarakat Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Kita juga ingin menyampaikan soal *public transportation*, bagaimana **kita** berharap bahwa akan ada tambahan kapal *express* untuk daerah (D2 K 350, 31).

Penggunaan pronomina dalam kalimat yang menyampaikan harapan untuk adanya tambahan kapal ekspres untuk daerah tertentu mencerminkan hubungan sosial dan tingkat kedekatan antara penutur dan pendengar. Mari kita lihat bagaimana pronomina berfungsi dalam konteks tersebut:

Jika kita menggunakan pronomina pertama, seperti "kita" atau "kami," dalam kalimat tersebut, misalnya, "Kita berharap akan ada tambahan kapal ekspres untuk daerah," maka penutur menunjukkan inklusivitas. Penggunaan "kita" menciptakan rasa kebersamaan dan solidaritas antara penutur dan pendengar. Dalam konteks ini, penutur mengajak pendengar untuk berbagi harapan yang sama, sehingga menciptakan ikatan sosial yang lebih kuat.

Pronomina yang Digunakan Paslon Syaifullah Yusuf

Strategi Syaifullah Yusuf dalam komunikasi politik menurut hasil pencermatan peneliti menggunakan kata **kami** walaupun kadang-kadang juga menggunakan kata kita. Secara deskriptif kutipan di bawah ini merupakan sebagian dari debat publik Pilkada Jatim 2018. Kalimat yang diangkat dalam debat publik kali ini, yaitu "**Kami** ingin transportasi antarpulau bisa kali kita garap bersama-sama, untuk menyeimbangkan pembangunan dari 48 pulau yang dihuni baru 6 yang memiliki pelabuhan" Aktor menggunakan pronomina persona kami pada dua klausa. Klausa pertama "**Kami** ingin transportasi

antarpulau bisa kali kita garap bersama-sama.” Klausa kedua ”untuk menyeimbangkan pembangunan dari 48 pulau yang dihuni baru 6 yang memiliki pelabuhan,”

Secara interpretatif dan eksplanatif kutipan ini dapat dianalisis ideologi penghasil teksnya sebagai berikut. Pertama, penutur/ Paslon Syaifullah Yusuf memosisikan dirinya bersama Puti Guntur Sukarno mengindahkan ‘jarak psikologis’ yang lebih besar lagi. Dengan sikap itu, ia seakan-akan hendak menyembunyikan kepribadiannya. Ia tidak ingin mengacu dirinya secara langsung dengan masyarakat pendukungnya. Soal transportasi antarpulau bisa digarap bersama-sama. Hal ini dimaksudkan menyeimbangkan pembangunan dari 48 pulau yang dihuni baru 6 yang memiliki pelabuhan. Kedua, Syaifullah Yusuf menggunakan pronomina persona **kita**, dengan harapan kita akan bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang nantinya dapat mempermudah akses usaha dan bisnis seluruh masyarakat Jawa Timur. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut:

Kami ingin transportasi antarpulau bisa kali kita garap bersama-sama untuk menyeimbangkan pembangunan, dari 48 pulau yang dihuni baru 6 yang memiliki pelabuhan (D2 S315-320, 30).

C. Nilai Ekspresif

Nilai ekspresif gramatika ditunjukkan oleh modalitas ekspresif. Modalitas menjadi ekspresif jika modalitas adalah persoalan otoritas penutur atau penulis yang berkenaan dengan kebenaran atau kemungkinan representasi realitas. Dalam modalitas ekspresif terkandung makna 'kemungkinan', 'izin', 'kepastian', 'kewajiban', termasuk juga 'ketidakmungkinan'. Menurut Fairclough (1989:129) kepentingan ideologis

dalam tuntutan terhadap "autentisitas" atau "pengetahuan" dibuktikan melalui bentuk-bentuk modalitas.

Nilai Ekspresif yang Digunakan oleh Paslon 1

Nilai ketiga dalam gramatika adalah nilai ekspresif. Nilai ekspresif gramatika ditunjukkan oleh modalitas ekspresif. Modalitas menjadi ekspresif jika modalitas adalah persoalan otoritas penutur atau penulis yang berkenaan dengan kebenaran atau kemungkinan representasi realitas. Menurut Fairclough (1989:129) kepentingan ideologis dalam tuntutan terhadap "autentisitas" atau "pengetahuan" dibuktikan melalui bentuk-bentuk modalitas. Dalam modalitas ekspresif terkandung makna 'keharusan', 'keteramalan', 'kemampuan', 'kepastian', dan sebagainya.

Secara deskriptif analisis terhadap kutipan diuraikan sebagai berikut. Dalam kutipan di bawah ini terdiri atas tiga klausa yaitu pertama, "Pelayanan satu atap dengan *system on line system* ini harus memberikan grasi kepada calon investor." Klausa kedua, yaitu: "bahwa pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota harus bersaing." Klausa ketiga, "bahwa pertumbuhan ekonomi harus berseiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat."

Secara interpretatif dan eksplanatif kutipan tersebut menunjukkan analisis terhadap ideologi penghasil teksnya dapat dikemukakan sebagai berikut. Pertama, dalam kutipan itu penghasil teks, dalam hal ini Kofifah, menggunakan modalitas yang menyatakan makna "keharusan". Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa *system on line system* harus selalu memberikan grasi kepada calon investor; pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus bersaing, dan

pertumbuhan ekonomi harus seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat Dengan bermodal keharusan, Kofifah akan bisa mewujudkan pelayanan satu atap dengan *system on line system* Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

Pelayanan satu atap dengan *system on line system* ini harus memberikan grasi kepada calon investor, bahwa pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota harus bersaing bahwa pertumbuhan ekonomi harus berseiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat (D2 K 705, 39).

Dalam kalimat tersebut, terdapat ekspresi harapan yang kuat terkait dengan pelayanan satu atap. Penutur berharap bahwa sistem online akan memberikan kemudahan dan grasi kepada calon investor. Harapan ini menunjukkan keyakinan penutur bahwa dengan adanya kemudahan dalam proses investasi, akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Ekspresi harapan ini menciptakan nada positif dan optimis, yang menggambarkan keinginan penutur untuk melihat perubahan yang lebih baik dalam kebijakan pelayanan publik.

Penutur juga mengekspresikan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dengan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan peningkatan kesejahteraan. Kalimat ini menunjukkan bahwa penutur tidak hanya memikirkan aspek ekonomi secara sempit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari pertumbuhan ekonomi tersebut. Ekspresi ini mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab sosial, yang penting dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan bahwa "pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten Kota harus bersaing" menekankan pentingnya kompetisi dalam menciptakan kebijakan yang lebih baik untuk mendukung investasi dan kesejahteraan masyarakat. Ini mencerminkan keyakinan penutur bahwa persaingan sehat antara pemerintah daerah dapat mendorong inovasi dan efisiensi dalam pelayanan publik. Ekspresi ini mengindikasikan semangat dan motivasi untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi dan kompetisi antar daerah.

Nilai Ekspresif yang Digunakan oleh Paslon 2

Nilai ketiga dalam gramatika adalah nilai ekspresif. Nilai ekspresif gramatika ditunjukkan oleh modalitas ekspresif. Modalitas menjadi ekspresif jika modalitas adalah persoalan otoritas penutur atau penulis yang berkenaan dengan kebenaran atau kemungkinan representasi realitas. Menurut Fairclough (1989:129) kepentingan ideologis dalam tuntutan terhadap "autentisitas" atau "pengetahuan" dibuktikan melalui bentuk-bentuk modalitas. Dalam modalitas ekspresif terkandung makna 'keharusan', 'keteramalan', 'kemampuan', 'kepastian', dan sebagainya.

Secara deskriptif analisis terhadap kutipan diuraikan sebagai berikut. Dalam kutipan di bawah ini terdiri atas dua klausa yaitu pertama, "Kabeh sedulur kabeh makmur itulah cita-cita **kami** berdua." Klausa kedua, yaitu: " untuk mewujudkan Jawa Timur yang warganya merasa semua satu saudara dan kemudian makmur bersama-sama."

Secara interpretatif dan eksplanatif kutipan tersebut menunjukkan analisis terhadap ideologi penghasil teksnya dapat dikemukakan

sebagai berikut. Pertama, dalam kutipan itu penghasil teks, dalam hal ini Syaifullah Yusuf, menggunakan modalitas yang menyatakan makna “kemampuan”. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa “Kabeh sedulur kabeh makmur itulah cita-cita **kami** berdua.” Klausula kedua, yaitu: “ untuk mewujudkan Jawa Timur yang warganya merasa semua satu saudara dan kemudian makmur bersama-sama.” Dengan bermodal kemampuan, Syaifullah Yusuf) akan bisa mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut ini.

Kabeh sedulur kabeh makmur itulah cita-cita **kami** berdua untuk mewujudkan Jawa Timur yang warganya merasa semua satu saudara dan kemudian makmur bersama-sama (D1 S 265, 6).

Frasa "kabeh sedulur" menunjukkan penekanan pada nilai kebersamaan dan persaudaraan. Penutur mengekspresikan keinginan agar seluruh warga Jawa Timur merasa terikat satu sama lain sebagai saudara, terlepas dari perbedaan yang ada. Ini menciptakan nuansa inklusivitas dan solidaritas di antara warga, yang sangat penting dalam membangun komunitas yang harmonis. Nilai ini menunjukkan bahwa penutur mengutamakan hubungan sosial yang erat dan saling mendukung di antara anggota masyarakat.

Kalimat ini juga mencerminkan harapan penutur bahwa semua orang di Jawa Timur dapat mencapai kemakmuran bersama. Penggunaan kata "makmur" menunjukkan tujuan yang lebih besar dari sekadar kesejahteraan individu; penutur menginginkan kondisi di mana seluruh masyarakat dapat menikmati hasil dari pembangunan dan kemajuan ekonomi. Ekspresi ini menyoroti aspirasi untuk

menciptakan kondisi yang adil dan merata bagi semua orang, sehingga tidak ada satu pun yang terpinggirkan dalam proses pembangunan.

Dengan menyatakan "itulah cita-cita kami berdua," penutur menunjukkan komitmen dan dedikasi mereka untuk mewujudkan visi tersebut. Ini memberikan kesan bahwa penutur tidak hanya berteori, tetapi juga siap berupaya untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Nilai ekspresif ini menunjukkan motivasi dan semangat dalam mewujudkan tujuan bersama, yang dapat memicu inspirasi bagi orang lain untuk ikut serta dalam menciptakan perubahan positif.

D. Result

Hasil/ result dari debat kedua paslon itu sebagai berikut:

- 1) Paslon nomor 1, mempunyai pandangan, bahwa Jawa Timur ke depan membutuhkan alat transportasi umum yang lebih baik dan terjangkau oleh masyarakat. Ukuran lebih baik artinya lebih nyaman bisa memenuhi keinginan masyarakat, lebih enak dinaiki dan lebih modern. Dengan transportasi umum yang lebih baik akan mendorong angkutan umum lebih kondusif, masyarakat mau menggunakan, sehingga tidak cenderung masyarakat menggunakan kendaraan pribadi. Kondisi jalan lebih tertib, aman, dan lancar. Demikian juga untuk transportasi laut akan ada penambahan kapal ekspres untuk menjangkau daerah - daerah yang ada di Indonesia. Pernyataan paslon 1 menunjukkan ideologi, bahwa **transportasi laut ekspres harus segera terwujud sehingga dapat melayani masyarakat sebaik-baiknya.**

Adapun paslon nomor 2 memiliki pandangan, bahwa kita harus memperjuangkan pengembangan transportasi antarpulau yang harus dikerjakan secara bersama-sama, sehingga bisa menyeimbangkan dari

48 pulau yang dihuni baru 6 yang memiliki pelabuhan. Pernyataan paslon 2 menunjukkan ideologi, bahwa **pengembangan pembangunan transportasi itu merupakan penyeimbangan pembangunan di Jawa Timur ini.**

- 2) Paslon nomor 1 menggunakan kalimat negatif. Kofifah dalam hal ini mengobservasi dan mencermati pengangguran yang luar biasa. Pernyataan paslon 1 mengandung ideologi **pembangunan di Jawa Timur ini harus fokus menagani pengangguran.**

Paslon nomor 2 juga menggunakan kalmiat negatif bidang ekonomi, yakni masalah kesenjangan ekonomi Indonesia saat ini sudah luar biasa sampai saat ini belum bisa diselesaikan. Dalam hal ini pemerintah harus segera mendorong dan mensiner- giskan seluruh kekuatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah di - tetapkan. Apabila tidak dilakukan dengan cepat dan cermat akan membawa rakyat pada penderitaan. Pernyataan paslon 2 menunjukkan ideologi **tentang kesenjangan ekonomi yang luar biasa.**

- 3) Paslon nomor 1, dalam menjelaskan tujuan utama kepemimpinan yang diembannya adalah mewujudkan Jawa Timur yang bernafaskan budaya dan peradapan. Jawa Timur dapat berkembang pesat dengan memperhatikan dan berpegang pada budaya dan peradaban Jawa Timur. Pernyataan paslon nomor 1 ini sampai pada ideologi **kepemimpinan yang diemban di Jawa Timur berpegang pada budaya dan peradaban.** Adapun paslon nomor 2 , dalam menjelaskan tujuan utam kepemimpinannya ingin mengantarkan semua anak , pelajar, dan mahasiswa agar dapat menjadi manusia pembangunan

Jawa Timur yang dapat berkembang dengan pesat harus berpegang pada akidah yang berlaku. Pernyataan paslon 2 sampai pada ideologi **kepemimpinan yang diemban di Jawa Timur harus berpegang pada akidah/aturan agama Islam.**

UWKSPress

BAB V

TEMUAN DEBAT PUBLIK

Berdasarkan analisis data di atas, akhirnya peneliti dapat menarik simpulan sebagai berikut: Unsur gramatikal/pemaknaan kalimat dalam debat publik Pilgub Jatim 2018 mencakup kajian terhadap tiga nilai kalimat, yakni nilai eksperiensial, nilai relasional, dan nilai ekspresif.

- a) Nilai eksperiensial dalam debat publik pilgub Jawa Timur 2018 setiap paslon berikut ini. Pada umumnya paslon nomor 1 dan nomor 2 menggunakan (1) kalimat ketransitivan dan kalimat positif-negatif.
- b) Nilai relasional dalam debat publik pilgub 2018 berikut ini, pada umumnya Kofifah dan Syaifullah menggunakan modus kalimat dan pronomina persona.
- c) Nilai ekspresif dalam debat publik pilgub 2018, pada umumnya paslon Kofifah dan paslon Syaifullah Yusuf pada umumnya menggunakan modalitas ekspresif.

Saran

Berdasarkan analisis data di atas kandidat diharapkan dapat menerapkan nilai eksperiensial (pengalaman), nilai relasional, dan nilai ekspresif dalam melaksanakan debat publik agar dapat mempengaruhi massa pemilih. Dengan demikian akhirnya kandidat dapat memenangkan kontestasi yang berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Bogdan, Robert and Steven I Taylor. 1975. *Intoduction to Qualitative Reasearch to The Social Scienes*. New York: John and Sons, Inc.
- Brown, Gillian & Yule, George. 1996. *Discours Analysis*. Diterjemahkan oleh I. Soetikno. Analisis Wacana Jakarta: PT Gramedia Pustaka, Umum.
- Fairclough, Norman. 1985. *Critical and Descriptive Goals in Discourse Analysis*. *Journal of Pragmatics*, 9, hal 739-763).
- Fairclough, Norman. 1989. *Language and Power*. New York: Longman Group UK Limited.
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discours Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow-Essex: Longman Group Limited
- Fowler, R. 1985. Power. Dalam Van Dijk, T. (Ed.) *Handbook of Discourse Analysis Volume 4: Discourse Analysis in Society* (hlm. 61-82). London. Academic Press.
- Hadi, Sueb. 2001. *Bahasa Kampanye Pemilu 1999; Sebuah Kajian Sosiologistik*. Surabaya : PPS Unesa
- _____, 2007. *Aplikasi Bahasa Indonesia/ABI*. Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma Press.
- Halliday, M.A.K. 1986. *An Introductioonto to Funtional Grammar*. London: Edward
- John, J & Wareing S. 1999. *Language and Politics*. Dalam Thomas, L. dan Wareing, S. (Eds.), *Language, Society, and Power: An Introductions* (hlm. 31-48). London:Routledge.
- Kartomiharjo, Soeseno. 1988. *Bahasa Cermin Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Depdikbud.
- Hamdhan, Mochamad Isnaeni. 2007. *Kompendium Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*. Jakarta: Depkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional

- Noerhadi, 1989. *Dalam Bahasa Wanita pun Tersudut*. Prisma: Bahasa, Kekuasaan, dan Perubahan Sosial.
- Lyons, John. 1963. *Introduction to Theoretical Linguistics (Publication of the Philological Society, 20)* Oxford: Blackwell).
- Nasution. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* Bandung: Tarsito.
- Pomper (1970) dalam Lailiyah, 1977. *Analisis Wacana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan dalam Pemilu 1997 di Surabaya*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Van Dijk, Teun A. 1995. *Ideological Discourse Analysis*. Eija Ventola. (Eds) _____ . 1995. *Ideological Discours Analysis. Published in: New Caurant, Nol. 4 P.135. 1b/1995*: English Dept University of Helsinki.
- Wodak, R. 1996. *Disorders of Discourse*. Harlow-Essex. Addison Wesley Longman Limited.
- Wodak, Ruth dan Martin Rusigl. 2001. *Methods of Critical Discourse Analysis*. London. Sage Publications.

UWKS PRESS

Anggota IKAPI No. 206/Anggota Luar Biasa/JTI/2018
Anggota AAPTI No. 002.071.1.12019

Jl. Dukuh Kupang XV/54 Surabaya, Jawa Timur 60255

Telp. (031) 5677577

Hp. 085745182452

Email: uwkspress@gmail.com / uwkspress@uwks.ac.id